ISLAM *di* SINGAPURA

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

ISLAM DI SINGAPURA

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si,

Penerbit :

ISLAM DI SINGAPURA

ISBN : 978-623-93199-6-0

Penulis : Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si,

Editor : Mujang Kurnia
Desain Sampul : Tim Media Karya
Layout : Tim Media Karya
Foto Cover : www.suara.com &
www.travelingajadulu.com

Diterbitkan oleh Media Karya Publishing, Banten. 2020

CV. Media Karya Kreatif
Jl. Yudistira 17, Kavling Citra Pelamunan Indah, Kramatwatu,
Serang – Banten. Email : mediakarya.publishing@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas segala karunia dan rahmatNya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, pembawa syari'at Islam yang menjadi pedoman umat manusia dalam mengarungi samudra kehidupan ini sampai hari kiamat.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penerbitan buku ini, tanpa menyebut satu persatu, khususnya kepada Bapak Prof. DR. H.M.A. Tihami, M.A. M.M Rektor IAIN "SMH" Banten, Bapak Prof. DR. H. Fauzul Iman. M.A. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Bapak M. Hudaen, M.Ag., kami ucapkan terima kasih, semoga amal ibadahnya diterima Allah Swt.

Terakhir, rasa sukur cinta kami semakin lengkap jika segenap pembaca mempererat silaturrahmi dengan memberikan kritik dan tegur sapa atas karya bersahaja ini, semoga ridha Allah harapan tertinggi kita.

Penulis

DAFTAR ISI

1
PENDAHULUAN

Islam secara teologis adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan sekaligus bersifat transenden, dari sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam dan realitas sosial tidak hanya sekedar doktrin yang bersifat universal tetapi juga pengejawantahan dari dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu".[1] Ini menunjukkan, bahwa Islam bukan hanya sebatas doktrin-doktrin yang menyangkut tata cara ritual semata, namun lebih luas cakupannya termasuk didalamnya masalahmasalah politik.

Demikian pula hali senada diungkapkan Sayyid Qutub, bahwa" Islam adalah sebuah sistem bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya konsep ideologi yang menjelaskan hakekat alam semesta dan juga menentukan kedudukan manusia di alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Islam meliputi doktrin dan sejumlah aturan-aturan praktis yang bersumber dari keyakinan (ideologi), yang selanjutnya direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh doktrin-doktrin Islam dengan segala aturannya, meliputi dasar-dasar moral dengan segala kekuatan penopangnya, sistem politik dengan format dan karakter tersendiri, masalah sosial dengan landasan dan nilai sendtri, masalah ekonomi dengan filosofi dan institusinya sendiri, serta hubungan antar negara dengan segala keterkaitannya. Berdasarkan hai tersebut, maka diyakini bahwa Islam merupakan agama masa depan, terbukti bahwa sistem Islam sangat komprehensip menentukan antara satu dengan yang

[1] Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, Jakarta Paramadina, 1996, hal:i.

lainnya, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, semua kalangan membutuhkannya sesuai dengan aktifitasnya yang berbeda-beda”.[2]

Politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan agama dan politik, dalam istilah gerakan Islam modern adalah “Din Wa Daulah” (agama dan negara). Banyak cendekiawan muslim maupun non muslim yang mengatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyuluruh”.[3]

Kebangkitan Islam dan demokratisasi di dunia muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia orang beramai-ramai menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi, sehingga keduanya menjadi tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini. Kebangkitan agama dan demokratisasi ini merupakan dua fenomena paling penting dalam dasa warsa terakhir abad kedua puluh. Di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem politik yang lebih demokratis. Sementara di wilayah-wilayah lain, kedua dinamika itu saling bertentangan . Di dunia Islam issu-issu ini muncul ke permukaan secara istimewa disebabkan adanya kekuatan kebangkitan Islam dan menguatnya tuntutan terhadap partisipasi rakyat yang lebih besar dalam proses politik pada tahun-tahun belakangan ini.

Pada abad kedua puluh, gerakan-gerakan Islam mulai bermunculan, struktur dan pendekatan mereka berbeda-beda dengan gerakan-gerakan Islam yang lahir sebelumnya dan ini menandai lahirnya suatu organisasi Islam yang juga baru,

---

[2] Sayyid Suruh, Islamic The Religion of Future, Delhi, Ishaat al Islam Transt, 1350, hal, 7

[3] Lihat dalam Arthur Goldschmidt, Jr, A Conccise History of...

seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'at Islam, ABIM. Organisasi-organisasi Islam baru ini merupakan bagian penting dari kebangkitan Islam dalam dasawarsa terakhir abad kedua puluh ini, dimana tidak hanya sibuk merespon inisiatif pihak-pihak lain, tetapi mewakili lahirnya orientasi sosial politik alternatif yang dapat dipercaya. Gerakan-gerakan ini mencerminkan aspirasi ganda dari kalangan professional berpendidikan modern dan dari masyarakat muslim yang menghendaki partisipasi yang lebih besar dalam proses politik dan terwujudnya masyarakat yang lebih Islami.

Aspirasi ganda, yakni Islamisasi dan demokratisasi membentuk kerangka bagi hampir seluruh issu penting di dunia muslim dewasa ini yang apabila diamati issu-issu mengenai islamisasi dan demokratisasi adalah masalah-masalah yang penting berkisar antara Islam dan demokrasi, serta peranan gerakan-gerakan Islam baru dalam proses evolusi politik masyarakat muslim.

Kebangkitan dan demokratisasi belakangan ini berlangsung dalam konteks global yang menyatukan aspek-aspek kehidupan manusia yang paling penting, segala sesuatu sejak makanan yang dikonsumsi rakyat banyak hingga issu-issu kebijakan besar yang diputuskan para pemirnpin negara besar mencerminkan sifat kosmopolitan kedua tema, yaitu kehidupan sehari-hari negara dalam kehidupan dewasa ini. Perusahaan perusahaan besar dan kecil mesti memperhitungkan situasi internasional sebelum mengambil kepuusan investasi dan pengembangan usaha.

Di dunia sekarang ini, para aktor yang bermain di panggung dunia bukan hanya pemerintah dan negara. Dinamika permasalahan internasional telah melampaui sifat

internasional, dalam ekonomi global situasi lama yang didominasi oleh beberapa korporasi multinasional besar telah berubah menjadi suatu jaringan transaksi yang sangat interaktif ketika batas-batas nasional semakin tidak berperan dalam waktu singkat, bahkan bagi perusahaan-perusahaan kecil lokal.

Dunia Islam menunjukkan suatu pengalaman yang luas dalam fenomena kebangkitan agama maupun demokrasi. Setiap negara dan masyarakat muslim mempunyai sejarah yang unik dan sekaligus ciri-ciri yang sama dengan masyarakat muslim yang lain. Dalam upaya memahaminya ciri-ciri luas dan umum itu penting untuk diteliti sejumlah kontek politik yang berbeda-beda serta bagaimana berbagai pergerakan Islam bekerja di dalam konteks-konteks tersebut. Akan sulit membuat dalam beberapa buku, kumpulan kasus-kasus yang lengkap ikhwal gerakan-gerakan Islam gaya baru tahun 1990-an"[4]. Namun dari pengalaman dapat memberi wawasan penting mengenai spectrum pengalaman Islam yang akan memberi landasan bagi pemahaman yang lebih baik tentang kebangkitan Islam dan demokratisasi.

Ada tiga faktor yang dapat dikaji guna memahami peranan gerakan-gerakan Islam dalam kaitan kebangkitan Islam dan demokratisasi ini; Pertama, apakah gerakan-gerakan Islam itu berdiri secara legal atau illegal, apakah status ini berubah terhadap waktu. Kedua; sejauh mana gerakan baru itu dapat disebut sebagai suatu gerakan aktivis atau gerakan revolusioner terhadap sistem yang ada, atau dalam hai apa suatu gerakan bersesuaian bekerja sama dengan pemerintah yang ada; Ketiga, menyangkut sikap penguasa politik terhadap

[4] Lihat James P.Piscatari, *Islam in a world...*

gerakan-gerakan baru itu, apakah negara berupaya menindas gerakan-gerakan Islam atau apakah ada kesepakatan partisipasi politik tanpa kekerasan bagi gerakan-gerakan Islam. Kondisi-kondisi ini membentuk kerangka yang didalamnya gerakangerakan Islam berinteraksi dengan berbagai struktur negara dan sistem politik yang ada, yang interaksi ini dengan berbagai cara menjadi kunci untuk memahami hubungan antara kebangkitan Islam dan demokratisasi.

Tiga faktor pengalaman yang dipaparkan diatas mencerminkan perbedaan yang besar di dunia Islam. Spektrum yang bergitu lebar sejak kelompok Islam berhasil memegang tampuk kekuasaan di Iran dan Sudan dan gerakan-gerakan baru yang berpartisipasi aktif dalam sistem yang ada (Malaysia dan Pakistan), hingga gerakan-gerakan yang dianggap illegal dan terkadang ditindas dengan tegas (Al-Jazair dan Mesir) meskipun baru-baru ini tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, tentang latar berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, spectrum ini dapat memberi wawasan untuk memahami hubungan yang kompleks antara Islam dan demokrasi di dunia muslim kontemporer, dan memandang gerakan Islam semata-mata sebagai gerakan oposisi dan revolusioner, tidaklah cukup tetapi penting dikaji bagaimana gerakan itu bekerja dalam sistem yang heterogen dan bagaimana bila memegang kekuasaaan. Kaitan dengan faktor diatas, bagian komunitas muslim melayu Singapura yang dalam hai ini organisasi MUIS, termasuk dalam konteks gerakan kebangkitan yang mana dari ketiga faktor tersebut.

Sebagaimana diketahui Singapura yang pada zaman Singasari disebut sebagai Tumasek adalah sebuah negara

dengan luas tidak lebih besar dan kabupaten Karawang Jawa Barat, sebuah negara minirn sumber daya alam dan kekayaan bumi, yang benar-benar tak bisa menggantungkan kehidupannya dengan kekayaan alam, Raffleslah yang pada awal abad 19 tepatnya 1819 mulai merintis kehidupan di Tumasek, dengan mengetahui Tumasek secara geografis menjadi perlintasan dagang internasional mulai menyewanya dari seorang pangeran Melayu.

Tahun berjalan, zaman berganti, tahun 1942 tepatnya 12 April 1942 Jepang masuk Singapura mengalahkan sekutu di beberapa wilayah Asia termasuk Indonesia, dan Singapura diganti nama dengan Syanda artinya cahaya selatan atau sebuah pulau kecil yang akan menjadi negara turut berperan dalam percaturan dunia.

Jepang tak lama menguasai Singapura, kemudian direbut kembali oleh Inggris yang menjadikannya sebagai tambang uang bersama-sama Malaysia dan Brunei untuk melunasi utang Inggris pada Amerika sebagai bayaran sewa alat-alat perang karena perjanjian *Lend and Lease Act'*[5].

Roda zaman terus bergulir dan Singapura menjadi negara mandiri setelah melepaskan diri dengan Malaysia pada tahun 1965. Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang menjadi The Founding Father of Repub/ik Singapore, negara yang hanya memiliki garis pantai 150,5 kilo meter menjadi negara yang berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara umumnya, baik secara demografis maupun secara finansial, dimana secara demografis, etnis Cina menjadi mayoritas di negara ini dengan jumlah kurang lebih 75 persen dari total penduduk 3

[5] Lihat Karya Greg Poulgrain, The Genetis of Malaysia Konfrontasv Brunei and Indonesia, 1945-1965.

juta, sisanya 25 persen dibagi-bagi beberapa etnis melayu, tamil dan juga India, secara finansial karena tidak memiliki sumber daya alam satupun orientasi ekonomi Singapura sejak awal mengarah pada industri jasa (profit oriented). Inilah yang membuat Singapura membuka dirinya bagi siapa saja, atau negara mana saja yang ingin menanamkan modal dan bekerjasama. Cara ini digunakan Singapura sebagai satu-satunya cara agar bisa eksis sebagai negara dan itu berhasil selain karena memang Singapura strategis di jalur pasar dunia, sehingga dapat menarik dimata Israel dan Amerika.

Kedua negara itulah yang masuk Singapura dengan membawa segudang kepentingan, ditambah lagi Singapura memang terobsesi menjadikan Israel sebagai negara model yang akan ditiru dalam bidang keamanan dan pertahanan dan Switzerland sebagai model di bidang ekonomi. Sebab, Singapura dan Israel nyaris sama dalam bidang yang satu ini. Israel adalah negara kecil (merebut tanah dan berusaha menjadi negara) di tengah komunitas Arab Timur Tengah, sedangkan Singapura merasa dirinya begitu pula, negara kecil dengan mayoritas etnis Cina yang hidup di kawasan Asia Tenggara dengan etnis mayoritas Melayu. Poin terakhir inilah (tentang mayoritas muslim melayu), kepentingan Israel, Amerika dan Singapura bertemu melakukan simbiosis mutualisme saling menguntungkan, saling memberi manfaat dan memanfaatkan.

Dalam kaitan dengan kebangkitan Islam dan demokratisasi yang merupakan issu global yang mendunia, bagaimana pengaruhnya terhadap komunitas muslim melayu Singapura yang merupakan etnis minoritas, dan implementasi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Singapura terhadap komunitas muslim melayu tersebut yang diwakili oleh

lembaga MUÍS, bagaimanakah dalam penerapan nilai-nilai Islam maupun dalam kebijakan di bidang ekonomi (pemberdayaan masyarakat), sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan sinergis antara komunitas muslim melayu dengan penguasa negara.

Tidak sebagaimana politik komunitas muslim di negara-negara lain yang telah banyak dibahas oleh para pemikir, kajian mengenai politik Singapura modern sedikit sekali literature yang mengkajinya, kecuali untuk kawasan Asia Tenggara (studi kawasan) yang dikaitkan dengan komunitas muslim melayu sebagaimana yang ditulis oleh John L Esposito dan John V Voli" Demokrasi di negara-negara muslim 1999, yang sedikit sekali menyinggung tentang Islam dan identitas muslim melayu, karena memang sulit untuk dapat membahas komunitas muslim di Singapura yang sejak awal memang menjadi federasi dengan Malaysia, maka apabila ingin mengetahui bagaimana politik komunitas muslim melayu di Singapura harus dikaitkan dengan Islam di Indonesia dan Islam di Malaysia, karena dua negara besar tersebut yang mengapit Singapura dan mayoritas penduduknya komunitas muslim melayu dimana muslim melayu tersebut identik dengan Islam.

Kajian mengenai Singapura dikaji oleh para pemikir dalam bidang politik mengenai politik ekonomi. Singapura sebagaimana artikel yang ditulis oleh Edi Maszudi seorang pengamat masalah ekonomi-politik intemasional dan ketua center strategie for developmentand intemasional relation (CSDIR) berpendapat bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan Singapura mampu memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance); faktor pertama, karena mayoritas bangsa Singapura adalah etnis

tionghoa sehingga kebijakan politik otoriter rezim PAP dan Lee Kwan Yew tidak terlalu merugikan kepentingan rakyat, sebab Lee Kwan Yew benar-benar bekerja keras membangun Singapura menjadi pelabuhan komersial dan menciptakan pemerintahan yang kuat (strong governance); Kedua, figure Lee Kan Yew sebagai bapak bangsa yang sukses membangun Singapura seperti sekarang ini adalah orang tua yang layak dihormati dan disegani, dimana kharismanya mampu mengimbangi kebesaran bangsa Singapura, sehingga setiap statemen politik pemimpin senior ini mempunyai dampak yang nyata bagi stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara; Ketiga, dengan jumlah penduduk yang hanya 4 juta jiwa, bahkan cenderung semakin mengecil, memudahkan elite politik negara ini untuk memantau ekonomi dan politk[6].

Kajian lain tentang Singapura adalah artikel yang ditulis oleh Herry Nurdi yang berjudul "Menguak anta rahasia antara Israel dan Singapura", ditulis secara berseri dari 1 sampai 5 yang mengungkapkan awal dirintisnya keterlibatan Israel dan Yahudi pada tahun 1960 untuk membangun negara yang baru mulai berdiri yakni Singapura, karena kesamaan persepsi antara Israel dan Singapura, bahwa Israel adalah negara kecü yang dikepung oleh negara-negara muslim di timur tengah tetapi memiliki kekuatan militer yang kuat, demikian pula Singapura negara kecil yang dikepung (diapit) oleh dua negara besar berpenduduk mayoritas muslim melayu, dan Israel berdasarkan perencanaan yang matang dari gerakan zionis internasianal menempatkan diri bersama Singapura menjadi satelit Israel dan kekuatan Yahudi di Asia Tenggara[7].

---

[6] Suara Merdeka, Wacana, Kamis, 12 Agustus 2004.
[7] Herri Nurdi, Menguak Cinta Rahasia Israel-Singapura, Kamis, 23 November 2006.

Adapun kajian-kajian lain mengenai politik di Singapura, adalah artikel yang ditulis oleh DR. Azmi Hasan dalam "The New Straits Times" edisi 26 Juli 2000, yang menyatakan bahwa kerjasama satelit intelejen antara Israel dan Singapura akan menambah ketegangan antara Singapura dan Malaysia bahkan juga Asia Tenggara[8]. Keberadaan kerjasama satelit intelejen Singapura dan Israel itu agaknya sudah cukup bagi sebagian kalangan di Asia Tenggara, terutama Malaysia untuk menyebut Singapura sebagai Israel di Asia.

Kecil negaranya, besar pengaruhnya, barangkali itulah ungkapan yang tepat untuk Singapura. Selama ini boleh jadi kekuatan ekonomi Singapura dikenal di seluruh dunia, bahkan sering pula disebut-sebut sebagai pusat keuangan di Asia tenggara, indikator-indikator keuangan dan makro ekonomi negeri itu seringkali menjadi brenchmark bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Tidak heran kalau selama puluhan tahun, negeri kecil itu seolah jadi oase di tengali kemiskinan dan ketidakstabilan di Asia Tenggara. Hai ini dapat dilihat puluhan atau malah ratusan perusahaan multinasional barat membuka basis regionalnya di Singapura. Ekonomi pasar bebas, infra struktur modem, pusat perbelanjaan, serta layanan kesehatan kelas tinggi, tak pelak menjadikan Singapura yang didominasi populasi imigran Cina seperti rumah sendiri bagi siapapun pendatang.

Keramahan dan kesejahteraan perekonomian Singapura bukan mustahil membuat siapapun terlena, padahal sesungguhnya ada sisi lain dari Singapura yang tidak mustahil menjadi momok mengerikan terutama bagi negaranegara

---

[8] Republika, Israel Di Asia Tenggara Bagian 2, Jumat, 10 Januari 2003.

tetangganya di Asia Tenggara yang nota bene bangsa melayu dan mayoritas pemeluk Islam.

Jika mendengar Singapura, mungkin sikap negara-negara Islam akan berbeda dibandingkan dengan nama Israel, padahal momok mengerikan seperti tersebut di atas tidak lain eratnya keterkaitan kedua nama itu, bahkan hampir semua sektor kehidupan, mulai dari pertahanan negara, bisnis, sampai bidang sosial.

Singapura menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan model mstminder. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana mentri (prime minister). Parlemen dibagi dua kamar; kongres atau majlis tinggi dan majlis rendah (House of haw), pemilihan anggota parlemen dilaksanakan 4 tahun sekali, anggota parlemen memilih perdana mentri yang nantinya membentuk kabinet, sedangkan pemilihan presiden dilakukan setelah pemilihan anggoa parlemen yang didalam konstitusi Singapura diamanatkan untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung, jadi kekuasaan presiden semakin kuat"[9] Dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat bangsa yang demokratis, peran rakyat di arena politik nasional melalui pembentukan sebuah pemerintahan ditempuh melalui general election, dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk memerintah.

Dalam setiap pemilu, negara ini menggunakan sistem distrik dan panggung politik Singapura tetap didominasi oleh people action party (PAP) yang didirikan oleh PM Lee Kwan Yew. Partai ini merupakan the ruling party, dimana pemikiran politik Lee Kan Yew mampu menciptakan strong governance, yakni bagaimana membuat sistem politik memberikan ruang terhadap

---

[9] The Encyclopedia Brita Nie, hai. 769-788

reformasi politik memperkuat lembaga presiden, dan memberi jaminan kursi kepada oposisi”[10] Dengan strategi ini pada satu pihak diharapkan dapat menjamin kestabilan sistem dan pada sisi lain diharapkan mampu membatasi pengaruh oposisi, jadi kubu oposisi tidak berkembang. Situasi ini sudah dirancang oleh arsitek politik Singapura. Ada dua alasan mengapa kubu oposisi tidak mampu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik; pertama, pihak oposisi tidak mempunyai tokoh yang handal dan setara dengan Lee Kwan yew; kedua, kubu oposisi tidak mudah memberikan wacana alternatif sebab ruang lingkupnya sudah dibatasi.

Selain kedua alasan tadi menurut Edi Muszadi ada satu faktor lagi yang berpengaruh dalam demokrasi di Singapura, yaitu konsep nilai-nilai Asia (Asia Values)[11]. Dimana dalam studi politik belum ada kesepakatan yang jelas, sebab setiap negara mempunyai budaya politik yang has, budaya politik tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktek-praktek demokrasi yang modem di sebuah negara. Yang di maksud nilai-nilai Asia adalah sikap hormat kepada pemimpin (senioritas) kerja keras, memaafkan, menganggap pemimpin merupakan wakil mhan di bumi, hormat kepada orang lebih ma dan menghindari konfrontasi bila terjadi perbedaan pendapat.

Praktik nilai-nilai Asia di Korea selatan misalnya, sangat terpengaruh oleh budaya konfsusion, dan budaya lokal sehingga etos kerja bangsa Korea Selatan mampu membawa negara yang miskin sumber daya alam menjadi negara yang merajai di bidang

---

[10] Kubu oposisi belum bisa memperoleh kursi di parlemen pada pemilu 1981, ketika itu partai pekerja mampu memasukan kadernya lewat pemilu sususan

[11] Edi Masjudi, Realisasi Nilai-Nilai Asia di Singapura, Wacana, Republika 12 Agustus2004

industri, begitu juga hormat kepada yang lebih ma atau pemimpin yang lebih ma, ternyata mampu membawa dampak yang positip terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Korea Selatan.

Demikian pula praktik nilai-nilai Asia di Malaysia adalah bagaimana bangsa melayu menjadikan mantan PM Mahatir Mohammad sebagai bapak bangsa dan pembangunan, padahal tidak semua trach record Mahatir positip bagi perkembangan demokrasi di semenanjung Malaka, misalnya saja hubungan Mahatir dengan Anwar Ibrahim yang tidak harmonis sampai sekarang ini tapi rakyat Malaysia tetap memberikan tempat terbaik bagi Mahatir yang mampu membawa bangsa dan negara Malaysia menjadi negara industri baru yamg disegani di Asia.

Sama halnya dengan Singapura, sebagai pendiri Singapura pengaruh Lee Kuan Yew sangat besar dalam budaya politik. Lee Kuan Yew adalah pemimpin senior yang sudah mengundurkan diri dari kancah politik nasional akan tetapi pamor pemimpin seangkatan presiden Suharto itu sangat kuat. Boleh jadi demikian pula bagi komunitas muslim Melayu di Singapura, konsep nilai-nilai Asia tersebut mempengaruhi dalam budaya politik bagi nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat survive di negara yang sangat otoriter tersebut.

Dari uraian di atas mendorong penulis untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul "ISLAM Dl SINGAPURA (Studi Tentang Veranan Muis dalam Pembinaan Umat Islam)" yang kemudian dijadikan sebuah buku.

Pembahasan mengenai Islam dan politik di Singapura dikaitkan dengan peranan lembaga MUIS dalam peranannya sebagai mediator bagi komunitas muslim melayu cukup signifikan dengan alasan-alasan :

1. Singapura sebagai negara transit perdagangan dunia internasional diapit oleh dua negara yang penduduknya mayoritas muslim melayu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan di kawasan Asia Tenggara.
2. Sebagai negara republik yang menggunakan sis tem parlementer, ternyata sistem politik Singapura sangat terpengaruh oleh nilai-nilai lokal (Asia Value), bagaimana wujud praktek nilai-nilai Asia tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diterapkan.
3. Sebagian besar mayoritas bangsa Singapura adalah etnis tionghoa, sehingga kebijakan politik pemerintahannya adalah otoriter, bagaimana kebijakan itu implementasi-nya terhadap muslim melayu.

Akibat dari pemerintahan otoriter tersebut dalam kaitannya dengan gerakan-gerakan atau lembagalembaga kemasyarakan, bagaimana dapat dñakukan hubungan yang harmonis dan sinergis sehingga masingmasing oraganisasi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dapat survive dan exist dalam menjalankan program dan nilai-nilai kehidupan dengan baik.

2
GAMBARAN UMUM NEGARA SINGAPURA

A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Singapura

Singapura memainkan peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sehingga Sir Stamford Raffles membentuk sebuah pelabuhan british disana. Dibawah koloni british itulah Singapura telah menjadi pelabuhan yang amat strategis dipandang karena terletak ditengah-tengah lalulintas perdagangan antara India dan Cina yang akhirnya menjadi pelabuhan yang terpenting di dunia sampai saat ini.

Semasa perang dunk ke II, Singapura dijajah oleh jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Diantara perwira yang menjadi korban dalam peperangan mempertahankan Singapura ini adalah letnan Adnan bin Saidi.

Setelah perang selesai penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Selanjutnya pada tahun 1963 Singapura bergabung dengan tanah melayu bersama-sama dengan Sabah dan Serawak untuk membentuk Malaysia, tetapi selanjutnya memisahkan diri untuk menjadi sebuah republik pada 9 agustus 1965.

Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai sejarah Singapura ini akan penulis bagi dalam beberapa fase, sebagai berikut :

1. Sejarah Masa Lampau

Pada masa dahulu sekitar abad ke 14, pulau Singapura merupakan bagian dari pada kerajaan Sriwijaya dan dikenal sebagai Temasek (Ko ta Laut). Dipercaya bahwa Singapura

merupakan pusat pemerintahan kerajaan melayu sebelum kemudian diduduki oleh Sir Stamford Raffles, ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan dari Abdullah bin Abdul Kadir yang mengatakan ketika Singapura dibersihkan, bukit yang terdapat disitu telah juga dikenali sebagai bukit larangan, dan terdapat banyak pokok-pokok buah yang ditanam disitu. Hal ini menunjukkan terdapatnya pusat kerajaan (Istana) disitu.

Selain dari pada itu Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi turut menyatakan dijumpainya satu batu bertulis yang mempunyai ukiran tulisan yang tidak dapat dikenali dan telah kabur, batu bertulis Singapura itu menunjukkan bahwa Singapura telah menjadi satu pusat kerajaan sejak dahulu jauh sebelum kedatangan pihak Inggris. Sayangnya batu bertulis itu telah dimusnahkan tidak lama setelah kedatangan Inggris oleh seorang jurutera Inggris, walaupun bagaimana terdapat satu catatan mengenai satu salinan tulisan tersebut telah diantar ke London, tetapi gagal untuk diartikan, sekiranya salinan tulisan itu dapat ditemukan kembali dapat memberikan gambaran tahun ketika batu itu ditulis melalui terjemahan ataupun melalui tulisan itu digunakan.

2. Pembentukan Singapura (1819)

Diantara abad ke-16 dan abad ke-19, kepulauan Melayu secara berangsur-angsur menjadi milik penjajah dari Eropa. Permulaan penjajahan dari barat dimulai ketika Portugis datang ke Malaka pada tahun 1509, ketika pada abad ke-17 Belanda telah menguasai sebagian pelabuhan-pelabuhan utama di kepulauan Melayu, pihak Belanda telah memonopoli semua perdagangan rempah ratus yang pada wakm itu merupakan bahan perdagangan yang penting, penjajah Eropa yang lain termasuk Inggris cuma mempunyai hak perdagangan yang kecil.

Pada tahun 1818, Sir Stamford Raffles telah dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan British (Inggris) yaitu di Bengkulu Sumatera. Raffles percaya bahwa Inggris perlu mencari cara untuk menjadi penguasa yang dominan (penuh) di negara jajahan, salah satu cara itu ialah dengan membina sebuah pelabuhan baru di selat Malaka, yang mana pelabuhan Inggris tersebut sebetulnya sudah ada seperti di Pulau Pinang, tetapi terlalu jauh dari selat malaka dan ketika itu Bengkulu mengahap ke Selat Sunda.

Pada tahun 1818 itulah Raffles berhasil meyakinkan Syarikat Hindia Timur British (EIC) untuk mencari pelabuhan baru di negara jajahan, kemudian Raffles datang ke Singapura pada 29 januari 1819, dia mendapatkan sebuah perkampungan melayu kecil di muara sungai Singapura yang diketuai oleh seorang Tumenggung Johor, pulau itu dibawah pemerintahan kesultanan Johor tetapi keadaan politiknya tidak stabil. Ahli waris sultan Johor, Tengku Abdul Rahman dikuasai oleh Belanda dan Bugis. Raffles kemudian mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman menjadi sultan hanya karena kakak sulungnya, Tengku Hussein tidak ada ketika ayahnya meninggal dunia. Mengikuti adat melayu calon sultan harus berada disisi sultan sekiranya ingin dilantik menjadi sultan. Sadar bahwa dia dapat memanipulasi keadaan ini, Raffles kemudian mendukung Tengku Hussein untuk menjadi sultan sekiranya Tengku Hussein sanggup memenuhi janji dengan Inggris membuka pelabuhan di Singapura dan sebagai balasan Inggris akan membayar uang tahunan kepada Tengku Hussein. Perjanjian ini disahkan pada 6 Februari 1819.

3. Fase Perkembangan Awal (1819-1826)

Sedikit sekali pembahasan mengenai fase perkembangan awal ini, tapi dapat digabungkan dengan fasefase lainnya karena

memang menempati tempat yang tersendiri pula, yakni ketika Raffles kembali ke Bengkulu tidak lama setelah menanda tangani perjanjian dengan kesultanan Johor, William Farquhar mengetahui koloni baru dari Inggris ini dengan bantuan sepasukan tentara Inggris. Tetapi dibalik masalahmasalah yang dihadapi, Singapura berkembang pesat karena statusnya sebagai sebuah pelabuhan bebas pedagang-pedagang Arab, Cina dan India menjadikannya sebagai tempat persinggahan.

4. Fase Pembentukan Negeri-Negeri Selat (1826-1867)

Pembentukan Singapura oleh Raffles mendapat masalah ketika kerajaan Belanda menuduh Inggris mencampuri daerah yang berada dibawah pengaruh kekuasaannya. Pada mulanya kerajaan Inggris dan Syarikat Hindia Timur Inggris menaruh simpati dengan masalah ini, tetapi lama kelamaan mereka mengabaikannya demi kepentingan kemajuan di Singapura, dan menjelang tahun 1822, sudah jelas niat Inggris bahwa tidak akan menyerahkan Singapura sedikitpun.

Status Singapura sebagai hak milik Inggris diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian InggrisBelanda 1824 yang mana kepulauan melayu terbagi kepada pengaruh dua kekuasaan, yakni kawasan utara termasuk pulau pinang, melaka dan singapura sebagai daerah dibawah kekuasaan Inggris, sedangkan daerah di sebelah selatan dibawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1826 Singapura bersama-sama dengan pulau Pinang, dan Malaka tergolong di bawah satu pemerintahan yaitu negeri-negeri selat.

5. Fase Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbour, salah satu objek Jepang adalah untuk menguasai Asia

Tenggara karena faktor ekonomi, Singapura yang merupakan pangkalan utama tentara sekutu ialah sasaran utama Jepang.

Di Singapura ramai dugaan bahwa Jepang akan menyerang terlebih dahulu sebelum menyerang Malaysia, pihak Inggris siap sedia dengan menyediakan pasukan perang terbaiknya, hai ini termasuk dengan dikirimkannya kapal perang HMS Prince of Wales dan Kapal Perang HMS Repulse, dan juga mengirim beberapa kapal perang yang lain.

Pada 8 Desember 1941, tentara Jepang mendarat di Kota Bharu, Kelantan, setelah dua hari tentara-tentara Jepang mendarat, kapal Prince of Wales dan Kapal Repulse tenggelam akibat dimusnahkan oleh tentara Jepang, tentara Jepang pun terus menjelajah ke seluruh tanah melayu menyebabkan tentara Inggris terpaksa mundur ke selatan menuju ke Singapura. Menjelang 31 Januari 1942 setelah 55 hari dimulainya penyerangan tentara Jepang, tentara Jepang sudah sukses menguasai seluruh tanah melayu dan bersiap-siap untuk menyerang Singapura.

Setelah beberapa peperangan, Letnan Jendral Arthur Ernest Percival dan tentara Inggris menyerah kalah kepada jendral Tomoyuki Yamashita pada tahun baru Cina yaitu 15 Februari 1942, lebih kurang 130.000 tentara India, Australia dan Inggris menjadi tahanan perang. Kejatuhan Singapura merupakan penyerahan kalah yang terbesar Inggris dalam sejarah. Singapura kemudian dinamakan menjadi Syonan-to (Sbonanto, cahaya sela tan) dalam bahasa Jepang, dan diduduki Jepang dari tahun 1942-1945.

6. Fase Pemerintahan Sendiri

Ketua partai buruh, David Marshall menjadi ketua Mentri Singapura yang pertama, dan memerintah sebuah kerajaan yang

tidak stabil yang mengakibatkan terjadinya peristiwa mogok besar-besaran. Pada April 1956 dia ke London untuk berunding mengenai kemerdekaan Singapura, tetapi üdak berhasil karena pengaruh komunis di Singapura. Marshall terus menekan Inggris bahwa dia akan meletakkan jabatan apabila Inggris tidak memberi kemerdekaan kepada Singapura, tetapi Inggris tidak menghiraukan tuntutan Marshall yang akhirnya terpaksa melepaskan jabatannya, ketua menteri selanjutnysa ialah Lim Yew Hock yang mengambil tindakan tegas terhadap ketua-ketua kesatuan pekerja (buruh) dan ahli-ahli pro komunis. Tindakan tegas Lim Yew Hock ini menyebabkan Inggris menyetujui untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada Singapura.

7. Fase Pembentukan Persekutuan Malaysia (1963-1965)

Pada 16 September 1963, Inggris menyetujui untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan tanah melayu supaya persekutuan Malaysia dapat dibentuk. Setelah menyertai Malaysia, partai utama politik Singapura yaitu partai tindakan rakyat (PAP) memenangkan pemilihan umum Singapura, tindakan PAP yang sering menyuarakan keüdakpuasaan mengenai keistimewaan kaum bumi putera.

Para pernimpin UMNO bersepakat untuk mengusulkan kepada kerajaan persekutuan untuk menangkap Lee Kwan Yew. Jadi pada tanggal 9 Agustus 1965 Tunku Abdul Rahman melepaskan Singapura dari Malaysia dan ramai rakyat Malaysia menganggap tindakan Tunku Abdul Rahman ini sebagai kerugian karena menyetujui Singapura lepas dari Malaysia, karena masih banyak cara lain untuk menjaga keamanan Singapura.

8. Republik Singapura (1965-sekarang)

Setelah Singapura keluar dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai penguasa perdagangan dunia, banyak kemudahan dan kemajuan dicapai semasa pemerintahan dipegang oleh Lee Kwan Yew. Pada tahun 1990, Lee Kwan Yew berhenti dari pemerintahan dan memberi kekuasaan kepada Goh Chok Tong, dan pada tahun 2004 Goh Chok Tong meletakkan jabatan sebagai perdana menteri dan memberi jalan kepada anak Lee Kwan Yew yaitu Lee Hsien Loong untuk memerintah.

Demikian latar belakang sejarah terbentuknya negara Singapura yang diambil dari internet.

B. Kondisi Geografis, Demografis dan Sosiologis

Republik Singapura ialah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia berdampingan dengan negeri Johor Darul Takzim (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia).

Negara ini luasnya 692,7 km persegi dan mempunyai penduduk yang berjumlah 4,16 juta dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di dunia dengan rata-rata penduduk Singapura naik 2,8 % (termasuk penduduk asing) pada tahun 2000, kelompok etnis terdiri dari bangsa Cina (76,8 %); Melayu (13,9 %); dan India (7,9 %) dan lain-lain (1,4 %), dengan ibu kota negaranya adalah Singapura sedangkan kepadatan penduduk 6,389/ km, dikepalai seorang presiden S. R Nathan dan sebagai perdana mentrinya adalah Lee Hsien Loong, mata uang nya adalah dolar Singapura, dan lagu kebangsaan adalah “Majulah Singapura”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Kepadatan:	6,389/km2
Bahasa resmi	Inggris, Melayu, Cina, Tamil
Bahasa lain	
Lagu kebangsaan	**Majulah Singapura**
Agama resini	
Agama lain	
Mata Uang	Dolar Singapura
Zon Waktu	UTC+8
Internet	.sg
Kod panggilan	65 (02 dari Malaysia)

Singapura dapat ditempuh lewat Johor dengan melalui selat di Woodlands, dan mempunyai sebuah jembatan (lalu untas pulau) yang bersambung dengan daerah Gelang Patah di Johor, jembatan tersebut terkenal sebagai ling kedua di Malaysia, dan mempunyai pulau-pulau kecil yang lain seperti pulau Tekong, Pulau Ubin dan Sentosa.

Secara demografi negara Singapura merupakan salah satu negara yang paling padat di dunia, di mana 85 persen dari penduduknya tinggal di rumah Pangsa yang disediakan oleh Majlis Pembangunan Perumahan (HDB).

Adapun jumlah penduduk penduduk Singapura bua dilihat dari segi komposisi umur 4.600.000 (perkiraan Juli 2003) adalah sebagai berikut [12]:

Struktur umur

Umur	**Persen**	**Lelaki**	**Perempuan**
0-14 tahun	18%	390.352	365.730
15-64 tahun	75%	1.520.875	1.590.355
65 tahun ke atas	7%	124.413	159.539

Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada table sebagai berikut[13]:

Tingkat pertumbuhan penduduk	3.54%
Tingkat kelahiran	12,79 kelahiran/1.000 penduduk
Tingkat kematian	4,21 kematian/1.000 penduduk
Tingkat perpindahan	26,8 migran/1.000 penduduk

[12] Sumber sensus penduduk tahun 2002
[13] Sumber sensus penduduk tahun 2002 (perkiraan 2000)

Untuk melihat komposisi penduduk Singapura dari segi perbandingan jenis kelamin adalah sebagai berikut [14]:

Perbandingan jenis kelamin

Umur	**lelaki/wanita**
waktu lahir	1,08
bawah 15tahun	1,07
11-64 tahun	0,96
65 tahun keatas	0,78
Jumlah penduduk	0,96

(ang. 2000)

Adapun untuk tingkat kematian bayi adalah 3,65 kematian/1000 kelahiran (ang.2000). Dan harapan hidup laki-laki; 77,1 tahun dan wanita; 83,23 tahun (perkiraan tahun 2000), sedangkan untuk tingkat kesuburan adalah 1,16 anak/ wanita (ang.2000).

Untuk tingkat melek huruf adalah umur 15 tahun ke atas, dan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut[15]:

Tahun	2000	1990
Jumlah	92,5%	89,1%
Lelaki	96,6%	95,1%
Wanita	88,6%	83,0%

Adapun untuk grafik jumlah penduduk dapat dilihat pada tebel berikut[16]:

[14] Sumber sensus penduduk tahun 2002
[15] Sumber sensus penduduk tahun 2002
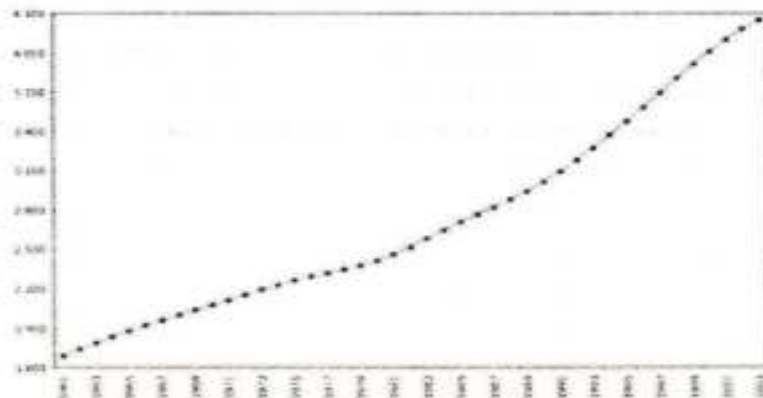
Singapura memiliki empat bahasa resmi dan bahasa-bahasa resminya adalah Inggris, Melayu, Cina (Mandarin) dan Tamil. Bahasa Kebangsaan adalah bahasa Melayu, tetapi lebih bersifat simbolik, ia digunakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan juga digunakan untuk latinan pasukan tentara dan polisi. Walaunpun penggunaan bahasa Inggris lebih umum, tetapi bahasa Inggris merupakan bahasa perantara diantara suku di Singapura, dan juga digunakan dalam sistem pendidikan dan dalam administras! pemerintahan. Bahasa Inggris pasar digunakan oleh rakyat Singapura dalam situasi tidak formai dikenal sebagai Singlish. Walaupun pemerintah Singapura menggalakkan penggunaan bahasa Mandarin untuk penduduk Tionghoanya, masih ada segelintdr penduduknya yang lebih fasih bertutur dalam dialek masingmasing, seperti; Hokkien, Tiochiu, Kantonis dan lain-lain, namun penggunaan dialek lebih bertumpu kepada penduduk yang telah berumur. Lebih dari 60 % penduduk India Singapura bertutur dalam bahasa Tamil sebagai bahasa ibu, dan bahasa-bahasa India yang lain termasuk Malayalam

[16] Sumber sensus penduduk tahun 2002

dan Hindi. Lebih kurang 5000 orang Baba Nyonya masih menggunakan sebuah dialek bahasa Melayu yang dikenal sebagai Baba Melayu. Pemerintahan yang dipimpin oleh People Action Party (PAP) lebih cenderung kepada penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (Lingua franca) dan penggunaan bahasa kebangsaan hanya terbatas kepada komunitas melayu saja, hanya sedikit dari komunitas Cina dan India yang fasih dalam bahasa melayu (mayoritas dari penduduk yang telah melalui masa Singapura sebelum merdeka).

Adapun symbol-simbol kebangsaan Singapura adalah; seperti benderà, lambang negara Singapura adalah Kepala Singa yang menunjukkan tentang keberanian, kekuatan dan kecerdasan (courage, strength, and excellence), dan ikrar negara Singapura yang diciptakan oleh Encik S. Rajaratman pada tahun 1966.

Lambang Singapura diluncurkan pada 3 Desember 1959 bersamaan dengan pelantikan yang dipertuan Negara Singapura yang pertama Yusof Ishak. Lambang ini terdiri dari sebuah perisai merah ditengah yang mengandung bulan sabit dan lima butir bintang. Warna merah melambangkan persaudaraan dan persamaan derajat manusia, putih melambangkan kesucian dan kebaikan , bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju, lima bintang melambangkan lima prinsip yang dipegang oleh Singapura; demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan dan persamaan. Disebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri, yang melambangkan Singapura dan sebelah kanan seekor harimau, melambangkan Malaysia yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Dan dibawah perisai terdapat kata “Majulah Singapura” yang merupakan Motto Singapura.

Menurut undang-undang lambang ini dilarang digunakan untuk tujuan komersial, hanya badan-badan pemerintahan yang berhak

memamerkan lambang tersebut di pekarangan bangunan (kantor) pemerintahan.

Dengan latar belakang kerusuhan antara komunitas Cina dan Melayu yang berkuasa pada tahun 50 ke 60an, kemudian bersatu dengan berikrar bahwa bahasa, bangsa dan agama dapat menjadi sebab perpecahan dalam masyarakat, dengan ikrar ini ingin ditekankan bahwa perpecarahan tersebut dapat diatasi jika rakyat Singapura benar-benar mengambil pelajaran dari riwayat negara mereka[17]. Ikrar ini diucapkan dalam bahasa Inggris oleh pelajar-pelajar sekolah setiap hari dan juga oleh rakyat Singapura pada hari kebangsaan setiap tanggal 9 Agustus.

Adapun symbol-simbol kebangsaan lainnya adalah seperri bunga kebangsaan yaitu; bunga Vanda Miss Joaquim, satu spesies anggrek yang merupakan Hybrid antara Vanda ters dan Vanda hookerana yang pertama kali ditemukan di kebun Cik Agnes Joaquim pada tahun 1893. Pada tanggal 15 April 1981 setelah pengumuman oleh mentri budaya, ketika itu dijabat oleh S. Dhanabalan bungan Anggrek Vanda Miss Joaquim dipilih sebagai bunga kebangsaan negara Singapura, pemilihan ini adalah salah satu langkah untuk memupuk kebanggaan dan identitas negara, bunga ini dipilih diantara 40 jenis bungan termasuk 30 jenis bungan anggrek yang lain.

Tepilihnya bungan anggrek Vanda Miss Joaquim ini karena sifatnya yang keras dan tahan lama dan berbungan sepanjang tahun,

---

[17] From Wikipedia, Simbol-simbol Kebangsaan Singapura, 24 Nopember 2006.1krar tersebut berbunyi sebagai berikut : Kami, warga negara Singapura, sebagai rakyat yang bersatu padu, tidak kira apa bangsa, bahasa, atau ugama, berikrar untuk membina suatu masyarakat yang demokratik, berdasarkan kepada keadilan dan persamaan utnuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kemajuan bagi negara.

sifat-sifat ini mencerminkan usaha Singapura untuk maju dan sukses di dalam semua aspek kehidupan.

Mengenai kehidupan keagamaan Singapura pada umumnya memberikan kebebasan beragama walaupun sebagian kelompok diperiksa dengan teliti oleh pemerintah , terdapat juga kelompok agama yang telah dilarang antara lain “saksi Yehuwa”.

Di Singapura, hampir seluruh orang Melayu beragama Islam. Agama-agama lain yang dianut oleh masyarakat Singapura termasuk Buddha, Taoisme, Konghucu, Hindu, Sikh dan Kristen. Untuk lebih jelasnya tentang agama-agama yang dianut oleh penduduk Singapura dapat dilihat pada table berikut[18] :

Buddha/Taoisme	51.0%
Iskm	14.9%
Tak beragama	14.8%
Kristen	14.6%
Hindu	4.0%
Lain-lain (Sikh, Konghucu, etc)	0.6%

Kemudian sekelumit tentang kondisi geografis, demografis dan sosiologis dari negara Singapura.

C. Sruktur Pemerintahan, Kondisi Politik, Ekonomi dan Budaya

Pemerintahan negara Singapura berdasarkan sistem Westminster, karena Singapura merupakan bekas jajahan Kerjaan Inggris. Jabatan Presiden adalah simbolik dan kekuasaan pemerintahan berada di tangán Perdana Mentri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen.

[18] Sumber sensus penduduk tahun 2002

Arena politik dikuasai oleh Partai Tindakan Rakyat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. Pemerintahan Partai Tindakan rakyat (PAP) sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan untuk partai-partai pembangkang tumbuh dengan efektif. Hal senada diungkapkan oleh Edy Maszudi; bahwa Partai Aksi Rakyat (PAP) yang didirikan oleh mantan Perdana Mentri Lee KwanYew itu merupakan The Piling Party, dimana pemikiran politiknya mampu menciptakan strong governance yakni bagaimana membuat sistem politik memberikan ruang terhadap reformasi politik memperkuat lembaga presiden, dan memberi jaminan kursi kepada oposisi. Yang dengan strategi ini disatu pihak dapat menjamin kestabilan sistem , dan pada sisi lain diharapkan mampu membatasi pengaruh oposisi, sehingga kubu oposisi baru bisa memperoleh kursi di parlemen pada pemilu 1981, ketdka itu Partai Pekerja mampu memasukkan kadernya lewat pemilu susulan [19]. Cara pemerintahan People Action Party ini dikatakan lebih cenderung kepada autoritarian dari pada demokrasi yang sebenarnya, namun cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara yang maju, bebas dari pada kerusuhan dan memiliki pasaran ekonomi yang terbuka, dan para ahli politik menganggap Singapura sebuah negara yang menganut paham “Demokrasi Sosialis”.

Disamping memberi batas terhadap partai oposisi, pemerintah Singapura juga terkenal dengan membatasi kemerdekaan pers dan kebebasan mengekspresikan pendapat bagi warga sipil, hai tersebut dapat dibuktikan dengan bagaimana allerginya pemerintah Singapura ketika pada bulan September ratusan organisasi masyarakt sipil (Civil Society Organisation) mengajukan ijin untuk menggelar pertemuan publik bertajuk Internasional Forum, dimana organisasi

[19] Eddy Maszudi, Realisasi nilai-nilai Asia di Singapura, Op-cit.

ini memiliki perhatian khusus terhadap sepak terjang lembagalembaga keuangan internasional seperti IMF, bank dunia dan lembaga-lembaga donor yang lainnya yang pada waktu itu akan mengadakan Annual Meeting. Pemerintah Singapura menanggapi dengan kelewat batas terhadap Civil Society Organisation dengan cara membatalkan International People Forum tersebut, termasuk dengan mengintervensi kepolisian daerah Kepulauan Riau agar tidak memberikan ijin penyelenggaraan IPF di Batam, setelah gagal diadakan di Singapura[20].Selain membatalkan pertemuan tersebut, pemerintah Singapura terus menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pertemuan IPF tersebut dengan berbagai issu yang dikembangkan seolah-olah pertemuan International People s Forum itu hanyalah kedok untuk mengacaukan Annual Meeting IMF/ World Bank yang berlangsung di Suntec City.

Demikianlah bagaimana pemerintah Singapura membatasi kebebasan berpolitik bagi partai-partai maupun rakyat sipil, apalagi untuk komunitas muslim melayu.

Adapun struktur Pemerintahan Negara Singapura Semenjak mulai merdeka, sebagai berikut :

1. Harry Lee Kwan Yew, Lahir 16 September 1923, Jabatan sebagai Perdana menteri Singapura Pertama, masa bakti 3 Juni 1959-28 November 1990.
2. Goh Chok Tong, Lahir, 20 Mei 1941, memulai karir politik dari Partai Tindakan Rakyat (PAP) pada tahun 1979, dari tahun 1979-1990 telah memegang jabatan menteri perdagangan dan industri, mentri kesehatan dan mentri pertahanan, sebelum mejadi perdana mentri yang ke 2 menggantikan Lee Kwan Yew.

[20] Blontypix, Singapura Potrei Pemerintah Paranoid, September 2006.

3. Lee Hsien Long, sebagai Perdana Mentri menggantikan Goh Chok Tong dan mentri Keuangan, mulai menduduki jabatan perdana mentri pada tanggal 12 Agustus 2004, ia anak dari pendiri Singapura dan bapak Pembangunan yaitu Lee Kwan Yew, karir politiknya dibina langsung oleh bapaknya hingga ia menduduki jabatan Perdana Mentri.
4. Prof. S. Jayakumar, menduduki jabatan sebagai Deputy Prime Minister dan Co-ordinating Minister For National Security and Minister For Law.
5. Mr. Wong Kan Seng. Menduduki jabatan sebagai Deputy Prime Minister for Home Affairs.
6. Mr. George Yong Boon Yeo, menduduki jabatan Minister for Foreign Affairs.
7. Dr.Lee Boon Yang, menduduki jabatan sebagai Minister for Information, Communication and The Arts.
8. Mr. Mah Bow Tan, menduduki jabatan sebagai Minister for National Development.
9. Mr. Lim Boon Heng, menduduki jabatan sebagai Minister Prime Minister Office.
10. Mr. Lim Hng Kiang, menduduki jabatan sebagai Minister for Trade and Industry.
11. Mr. Teo Chewe Hean, menduduki jabatan sebagai Minister for Defence.
12. Mr. Lim Swee Say, menduduki jabatan sebagai Minister Prime Minister’s Office.
13. Dr. Yaacob Ibrahim, menjabatan sebagai Minister for The Environment and Water Resources and Minister in Charge of Muslim Affairs.
14. Mr. Khaw Boon Wan, menduduki jabatan sebagai Minister for Health.

15. Mr. Tharman Shanmugaratnam, menduduki jabatan sebagai Minister for Education and second Minister
for Finance.
16. Dr. Ng Eng Hen, menduduki jabatan sebagai Minister for Menpower and Second Minister For Defence.
17. Dr. Vivian Balakrishnan, menduduki jabatan sebagai Minister for Commnunity Development, Youth and Sports and Second Minister for Information, Communication and The Arts.
18. Mr. Raymond Lim Siang Keat, menduduki jabatan sebagai Minisfor Transport and Second Minister for Foreign Affairs.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut[21]:

Prime Minister and Minister for Finance
Mr LEE Hsien Loong

Senior Minister
Mr GOH Chok Tong

Minister Mentor
Mr LEE Kuan Yew

Deputy Prime Minister, Co-ordinating Minister for National Security and Minister for Law
Prof S. JAYAKUMAR

[21] W

Deputy Prime Minister and Minister for Home Affairs
Mr WONG Kan Seng

Minister for Foreign Affairs
Mr George Yong-Boon YEO

Minister for Information, Communications and the Arts
Dr LEE Boon Yang

Minister for National Development
Mr MAH Bow Tan

Minister, Prime Minister's Office
Mr LIM Boon Heng

Minister for Trade and Industry
Mr LIM Hng Kiang

Minister for Defence
Mr TEO Chee Hean

Minister, Prime Minister's Office
Mr LIM Swee Say

Minister for the Environment and Water Resources and
Minister-in-charge of Muslim Affairs
Dr YAACOB Ibrahim

Minister for Health
Mr KHAW Boon Wan

Minister for Education &
Second Minister for Finance
Mr Tharman SHANMUGARATNAM

Minister for Manpower and Second
Minister for Defence
Dr NG Eng Hen

Minister for Community Development,

Mengenai partai-partai politik akan dijelaskan sedikit tentang partai-partai politik yang ada di Singapura yang turut serta dalam pemilihan umum baik untuk mengisi anggota parlemen maupun untuk memilih presiden. Adapun partai-partai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Partai Tindakan Rakyat (People's Action Party)

Partai ini adalah salah satu dari pada partai-partai politik Singapura, merupakan partai yang autoritarian. Partai Tindakan rakyat didirikan pada tahun 1954 di Victoria Memorial Hall, pimpinan pusat dijabat oleh Toh Chin Chye, dengan sekeretris umum dijabat oleh Lee Kwan Yew dan S. Rajaratnam. Sasaran partai tindakan rakyat adalah pekerja pos dan telkom, ahli persatuan, guru sekolah dan golongan pertengahan. Dengan tujuan ialah membina negara baru oleh rakyat, dengan usaha mereka dan diselenggarakan oleh partai. People's Action Party sangat dominan melalui sistem demokrasi parlementer dan tampil sebagai partai otoriter yang hampir tidak bisa dilawan oleh pihak oposisi. Bidang politik, sosial, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan bangsa, para pengeritik dari kalangan oposisi tak mampu berbuat banyak karena PAP sangat mendominasi parlemen, kebijakan-kebijakannya jarang ditentang rakyat, bahkan hampir tidak pernah terdengar adanya upaya demonstrasi. Hal ini turut membantu PAP meningkatkan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan negara yang pesat.

2. Partai Pekerja Singapura

Workers' Party atau partai pekerja merupakan salah satu partai oposisi yang terbesar di Singapura dan kini menduduki satu kursi di parlemen Singapura. Jumlah kursi yang paling banyak dimiliki oleh partai ini adalah dua dari tahun 1997-2000, ketika J.B Jeyaretnam dilantik sebagai seorang anggota parlemen tanpa pemilihan. Susunan Pengurus Workers' Party adalah sebagai berikut; Sylvia Iim (Ketua umum); Low Thia Khiang (sekretaris Umum); Tan Bin Seng (Ketua I); AbdulRahim bin Abdul Rahman (Ketua II); Poh Lee Guan (Sekretaris I); James Gomez (Sekretaris II); Tan Wui Hua (Bendahara); Goh Seng Soon

(Wakil Bendahara); Ng Ah Chwee (Wkl Sekretaris I); Chia Ti Lik (Wkl sekretaris II); Goh Meng Seng (Wkl sekretaris III); Jane Leong (Anggota);Lee Wai Leng (Anggota), Melvin Tan (Anggota), Mohammad Rahizan bin Yaacob (Anggota).

3. Partai Demokratik Singapura

Tidak ada penjelasan yang lebih terperinci mengenai partai ini, hanya merupakan salah satu dari partaipartai politik Singapura dan merupakan partai liberal di Singapura.

4. Partai Perpaduan Nasional

Sama halnya dengan partai demokratik Singapura, partai perpaduan nasional juga merupakan salah satu partai oposisi di Singapura dari partai-paratai politik yang ada.

5. Partai Rakyat Singapura

Singapore People's Party disingkat dengan SPP merupakan salah satu partai oposisi tengah kiri di Singapura. Partai ini didirikan pada tahun 1994 oleh Sin Kek Tong yang mengetuai tokoh yang menyokong Chiam See Tong keluar dari Partai Demokratik Singapura (SDP).

Selama tiga tahun, Sin Kek Tong merupakan sekretaris umum sementara partai ini sehingga Chiam See Tong mengambil alih jabatan tersebut setelah parlemen dibubarkan untuk masa pemilu 1997. Partai ini mendapatkan satu kursi dalam pemilu di potong pasir dengan pimpinannya Chiam See Tong menjadi anggota parlemen.

Pada tahun 2001, Chiam See Tong mengadakan kerjasama dengan Partai Perpaduan Nasional (NSP), Pertubuhan

Kebangsaan Melayu Singapura (SMNO), dan Partai Keadilan Singapura (SJP) untuk membentuk barisan oposisi terhadap Partai Tindakan Rakyat (PAP), dengan membentuk Partai Demokratik Singapura (SDA).

Dalam pemilihan umum tahun 2001, Chiam See Tong dikembalikan ke parlemen dengan mayoritas tipis sebagai anggota tunggal untuk partainya serta untuk SDA, anggota parlemen lainnya dari partai SDA ini adalah Steve Chia dari partai Perpaduan Nasional sekaligus anggota parlemen bukan daerah pemilihan karena dia merupakan pemenang kedua dari oposisi terbaik. Selain itu parlemen yang lainnya adalah Sin Kek Tong yang paling diingat untuk kegagalan pemilu yang tipis di daerah pemilihan Braddell Heights kepada anggota parlemen PAP yang berkuasa kini Goh Choon Kang période pemilu tahun 1991.

Logo partai SDA ini disesuaikan dengan logo partai SPP, dan mengenai kepengurusan partai diketuai oleh Sin Kek Tong (Ketua), Young Seng Fatt (Wkl Ketua); Chiam See Tong (Sekretaris Umum); Desmond Lim bak Chuam (Wkl Sekretaris Umum).

6. Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Singapura

Pertubuhan Kebangsaan Melayu Singapura (PKMS) adalah sebuah partai politik di Singapura, yang pada asalnya merupakan cabang dari partai UMNO (Malaysia), tetapi kemudian memisahkan diri dari UMNO ketika Singapura merdeka pada tahun 1965. Partai ini mengambil bagian dalam setiap pemilu dari tahun 1968 hingga 1991, tetapi gagal untuk memenangkan kursi.

Pada tahun 1997 partai ini tidak mengambil bagian dalam pemilu, dan merupakan anggota dari Perikatan Demokratik

Singapura sebuah partai politik yang terdiri dari gabungan empat partai oposisi di Singapura.

Partai PKMS ini merupakan partai politik tertua di Singapura dengan diketuai oleh Encik Muhammad Ali Aman, namun penerimaan masyarakat melayu kurang merespon sepenuhnya terhadap partai ini, karena dilihatnya sebagai partai politik musiman dan hanya partai pendukung di dalam pemilihan calon politik ketika pemilu diadakan.

Demikian sekilas mengenai kondisi politik di Singapura, sedangkan mengenai kondisi ekonomi dan budaya adalah bahwa Singapura memiliki sebuah pasaran ekonomi yang maju dan terbuka dengan Gross Domestik Produk (GDP) perkapita kelima tertinggi di dunia. Bidang ekspor, perindustrian dan jasa merupakan aspek-aspek terpenting dalam ekonomi Singapura.

Negara Singapura memiliki simpanan uang yang tinggi dengan memperkenalkan sistem penyimpanan uang wajib kepada para buruh (pekerja) [22].

Singapura juga menaruh perhatian yang sangat besar bidang pendidikan dan teknologi. Era globalisasi yang terjadi pada saat ini menyebabkan Singapura memberi lebih perhatian kepada usaha untuk menjadikan negara tersebut sebuah pusat keuangan dan teknologi di kawasan Asia.

Sedangkan kondisi budaya di Singapura lebih pada budaya masing-masing dari etnis penduduk Singapura lebih mewarnai budayanya, karena Singapura terdiri dari komunitas pendatang dari berbagai etnis, pada masa kini sebuah budaya Singapura

[22] Lihat Tabung Simpanan Pekerja (CPF).

yang unik belum terbentuk yang disebabkan dari adanya trend perkawinan antara komunitas belum dapat dimunculkan, namun dapat diwakili oleh sebuah perkumpulan hasil perkawinan antara komunitas muslim melayu dengan komunitas Cina yang dikenal dengan komunitas peranakan "Baba". Setiap masyarakat di Singapura masih berpegang teguh pada adat dan budaya masingmasing, dan ini dibuktikan dengan adanya berbagai perayaan yang terdapat di Singapura seperti; Tahun Baru Cina, Hari Vesak, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, Hari Raya Deepavali, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

3

ISLAM DAN POLITIK DI SINGAPURA

A. Islam dan Politik

Kebangkitan agama dan demokratisasi merupakan dua fenomena paling penting dalam dasawarsa terakhir abad kedua puluh. Di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem politik yang lebih demokratis. Sementara di wilayah-wilayah lain, kedua dinamika itu saling bertentangan. Di dunia Islam, issu-issu itu muncul kepermukaan secara isrimewa disebabkan adanya kekuatan kebangkitan Islam dan menguatnya tuntutan terhadap parrisipasi rakyat yang lebih besar dalam proses politik pada tahun-tahun belakangan ini.

Politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan “agama dan politik”. Dalam istilah gerakan Islam modem, Islam adalah “din iva daulah” (agama dan negara). Para pemikir muslim maupun non muslim menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan tidak mengenal kependetaan atau kelembagaan formai gereja [23].

Ada beberapa sistem politik yang berlaku di dunia muslim pada awal zaman modem, seperti beberapa yang termasuk kerajaan terbesar; misalnya kesultanan Usmaniyah di Eropa dan Timur Tengah, serta kesultanan Moghul di India diperintah oleh para sultan. Dibelahan dunia Muslim yang lain, ada kerajaan-kerajaan lebih kecil yang diperintah para bangsawan lokal, misalnya Imam di

---

[23] Lihat dalam Arthur Goldschmidt, Jr, A Concise History of Middle East, ed.ke 3, 1988,hal;49, Suzanne haneef, What Everyone Should Know about Islam and Muslim, Chicago, 1982, hal;83...

Yaman dan para pemimpin di kawasan teluk Persia, semua negara itu, tak terkecuali menghadapi tantangan perubahan sosial politik zaman modem.

Evolusi struktural yang berlangsung di negara-negara Muslim menyangkut dimensi ajaran Islam dan politik. Sistem politik diubah oleh para tokoh pembaharu terkemuka, seperti Muhammad Ali di Mesir dan Mustafa Kemal Ataturk di Turki pasca perang dunia ke-I. Lembaga-lembaga yang sudah mapan diubah dan para pembaharu menerapkan program-program perubahan kesadaran.

Dalam transformasi ini, hubungan Islam dan poltik menjadi perhatian utama selama dua setengah abad terakhir, sehingga kemudian memunculkan ketegangan antara gerakan- gerakan pembaharuan modern dengan lembaga-lembaga dan adat istiadat yang telah mapan dalam masyarakat Muslim pramodem. Dalam konteks ini, timbul ketegangan serius antara kekuatan modernisasi yang sering dipandang secara eksplisit sebagai pembaratan, dan unsur-unsur yang secara eksplisit mewakili Islam, yang sering dianggap sebagai kekuatan pramodern, jika bukan anti modern. Paham konservatisme dan tradisionalisme cenderung disamakan dengan Islam, sementara paham adaptasionisme dan pembaharuan cenderung disamakan dengan sekularisme dan perspektif barat modem. Para aktifis gerakan kebangkitan agama sering dituding berupaya memperlambat proses modernisasi dan menentang paham modern.

Negara-negara merdeka dengan mayoritas penduduk Muslim bergabung dalam dunia negara-bangsa yang berdaulat, sistem politiknya, baik yang berbentuk republik, radikal, maupun kerajaan konservatif, mengembangkan sruktur-struktur yang pada dasarnya termasuk dalam kerangka negara bangsa yang modem[24].

[24] John L. Esposito dan John 0. Voll, op-cit, hal, 4.

Perkembangan ini menentukan konteks politik di dunia Muslim pada paruh abad kedua puluh dan umat Islam tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa, baik di panggung politik internasional maupun domestik.

Masalah utama dalam perubahan besar ini adalah bagaimana menerapkan konsep dan struktur Islam ke dalam realitas sosial politik modern yang notabene telah terpengaruh Barat. Upaya semacam ini mengambil berbagai bentuk, seperti upaya-upaya intelektual untuk membangun suatu "*modernisme Islam*" berakar pada abad kesembilan belas dalam karya tokoh-tokoh semacam Muhammad Abduh di Mesir dan Ahmad Khan di India, dan modernisme Islam akhirnya menjadi madzhab teologi yang dominan di dunia Islam abad kedua puluh, dan memberi landasan intelektual yang fleksibel bagi artikulasi idiologi-idiologi alternatif semacam sosialisme Islam.

Peranan Islam dalam politik mulai mengalami perubahan secara signifikan pada tahun 1970-an hanya sekedar menjadi unsur reaktif dalam komunitas politik, kelompok-kelompok Islam mampu tampil sebagai sumber inisiatif bagi perkembangan dan perubahan politik. Pada tahun 1970- an para pemimpin negaranegara yang baru merdeka menghadapi kesulitan yang serius, harapan dan aspirasi yang tumbuh semasa perjuangan kemerdekaan ternyata menimbulkan banyak kekecewaan, ketidakstabilan politik, dan masalahmasalah besar ekonomi. Akibatnya banyak kalangan di dunia Muslim, seperti juga di tempat-tempat lain mulai mempertanyakan efektifitas dan kesahihan ideologi yang dianut, karena semakin banyak orang yang berpaling kepada Islam sebagai sumber ilham dalam masa-masa sulit, organisasi Muslim gaya baru menempati posisi semakin penting.

Organisasi-oraganisasi Islam baru merupakan bagian penting dari kebangkitan Islam dalam dasawarsa terakhir abad kedua puluh ini, mereka tidak hanya sibuk merespon inisiatif pihak-pihak lain, tetapi juga mewakili lahirnya orientasi sosial politik alternatif yang dapat dipercaya. Gerakan-gerakan ini mencerminkan aspirasi ganda dari kalangan profesional berpendidikan modem dan dari masyarakat Muslim yang menghendaki partisipasi yang lebih besar dalam proses politik dan terwujudnya masyarakat yang lebih I slami, dengan demikian organisasi-organisasi baru ini berhasil menyatukan dua kecenderungan utama dalam akhir abad kedua puluh yaitu kebangkitan agama dan demokratisasi.

Demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam kerangka sistem negara yang sudah ada, dengan tingkat pengaruh yang begitu kuat batasan-batasan politik yang diterapkan oleh politik impérialisme dan nasionalisme pada paruh pertama abad kedua puluh masih sangat mewamai batasan-batasan politik di era tahun 1990-an. Batasan negara bangsa merdeka luar biasa pentingnya dalam menentukan identitas kepemimpinan, dan lahan garapan gerakan-gerakan Islam gaya baru sekalipun ketika gerakan itu telah menyebar luas melampaui batasbatas negara. Seperti Ikhwanul Muslirnin yang berasal dari Mesir memiliki nama dan tradisi bersama yang melintasi batas-batas suatu negara, namun masih perlu untuk membahas kekhasan ikhwan-ikhwan di negaranegara lain. Demikian pula organisasi Jema'at-i Islami yang berada di Pakistan, Bangladesh, Afganisthan dan demikian pula halnya gerakan Jama'ah Islamiyah yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, bahkan Singapura yang pada akhk-akhir ini menghebohkan dengan mengadakan aksi pembomanpemboman di Indonesia, bahkan terjadi sampai dua kali pemboman di Bali yang menggegerkan dunia internasional, karena dari beberapa pelaku yang sudah di vonis baik hukuman mali maupun hukuman seumur hidup ternyata beragama

Islam, sehingga walaupun pengeboman terakhir (bom Bali II) belum terungkap siapa pelakunya dengan serta merta orang mengaitkan dengan ulah para pelaku pengeboman yang lain yaitu dari kalangan Muslim. Bahkan beberapa media asing langsung menunjuk kelompok jemaah Islamiyah sebagai dalang di balik serangan yang mengerikan itu, seperti dilansir oleh The Sunday Times, koran yang paling berpengaruh di Singapura sehari setelah peristiwa itu langsung menulis "All signs point to JI's (jama'ah islamiyah) hand in blast" (semua indikasi mengarah kepada keterlibatan JI, red)[25]. Dengan melihat strategi, waktu dan kuatnya ledakan, menurut koran ini mau tidak mau mengarahkan telunjuk kepada kelompok jama'ah islamiyah sebagai pelakunya dan stereotyping Muslim sebagai kaum radikal yang sangat merugikan umat Islam memang tidak henti-hentinya di blow up oleh media sebagai gerakan kekerasan dalam politik Islam dan konteks nasional yang khas akan memunculkan perbedaan dalam agenda dan metode diantara gerakan-gerakan Islam baru ini.

Makna penting batasan negara bangsa ini akan tampak manakala orang meneliti proses demokratisasi pada akhir abad kedua puluh ini. Di wilayah-wilayah non Muslim, hanya revolusi demokrasi di Jerman yang tidak mengakibatkan runtuhnya sebuah sistem politik negara itu, tetapi terbentuknya sebuah negara baru yang lebih besar. Kehancuran negara seperti terjadi di Yugoslavia dan Uni Sovyet, cenderung melahirkan beberapa negara bangsa yang lebih kecil dari pada yang sebelumnya. Demikian pula dengan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, Singapura yang tadinya merupakan federasi dengan Malaysia dan Brunei pecah menjadi negara bangsa yang

[25] Ahmad Ali Nurdin, Politik Islam tidak Monolitik, Wikipedia, berbahasa Indonesia.

berdiri sendiri-sendiri, hai itu menunjukkan bahwa identitas nasional memang mempunyai pengaruh yang luar biasa kuatnya.

Dengan demikian, bila kita cermati pengalaman gerakan-gerakan Islam dalam kaitannya dengan proses demokratisasi, kasus-kasus yang terjadi ditentukan oleh pengalaman dan kekhasan sistem negara bangsa yang bersangkutan. Gerakan-gerakan transnasional mempunyai day a jangkau dan day a tarik yang sangat terbatas dan gerakan-gerakan nasional itulah yang berupaya mengislamkan sistem politik yang ada yang memegang peran paling menentukan.

Ada tiga faktor yang sangat penting dikaji guna memahami peranan gerakan-gerakan Islam dalam mengembangkan hubungan antara kebangkitan Islam dan demokratisasi. Pertama; apakah gerakan-gerakan Islam itu berdiri secara legal atau illegal, dan apakah status ini berubah terhadap waktu. Kedua; sejauh mana gerakan baru itu dapat disebut sebagai suatu gerakan aktivis atau gerakan oposisi revolusioner bekerja sama dengan pemerintah yang ada, atau dalam hai apa suatu gerakan bersedia bekerja sama dengan pemerintahan yang ada. Ketiga; menyangkut sikap penguasa politk terhadap gerakan-gerakan baru itu, apakah negara berupaya menindas gerakan-gerakan Islam, atau apakah ada kesempatan partisipasi politik tanpa kekerasan bagi gerakan-gerakan Islam. Kondisi-kondisi ini membentuk kerangka yang di dalamnya gerakan-gerakan Islam berinteraksi dengan berbagai struktur negara dalam sistem politik yang ada. Interaksi ini dengan beragam cara, menjadi kunci untuk memahami hubungan antara kebangkitan Islam dengan demokratisasi.

Dalam hai ketiga faktor yang disebutkan di atas bagaimana penerapannya atau implementasinya di negara Singapura, apakah menganut faktor yang ketiga atau faktor-faktor yang lainnya, nanti dapat kita lihat pada sistem dan politik Islam di negara Singapura pada sub bab berikutnya.

B. Politik Islam di Singapura

Mengangkat kembali keterkaitan antara Islam dan politik bisa jadi merupakan persoalan yang membosankan. Hai ini disebabkan bukan oleh masalahnya yang tidak menarik, tetapi lebih dikarenakan oleh artikulasi yang hampir-hampir mengulang wacana yang pernah ada, padahal mestinya masalah hubungan antara Islam dan politik adalah subyek yang sangat menarik, dan sepanjang masa selalu menjadi soal yang bersifat recurrent, artinya masalah ini akan selalu muncul, sebab pada dasarnya Islam, umat Islam, atau kawasan Islam tak akan pernah bisa dipisahkan dari persoalan-persoalan politik.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa Islam dan Politik merupakan hai yang tidak bisa dipisahkan, hendaknya kita semua jangan lantas melompat pada sebuah kesimpulan bahwa ia tengah mempromosikan gagasan mengenai teokrasi atau keharusan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada dua sumber utama Islam yakni Alqur'an dan Sunnah. Sebab secara substansial bukan legal formal antara spritual dan non spritual saling mempengaruhi.

Richard Falk, salah seorang pelopor studi dan penelitian perdamaian, pernah berkata bahwa spiritually engaged politics merupakan keniscayaan, bahkan secara tidak langsung turut mempromosikan gagasan tersebut karena melihat potensi fungsi dan peran spritualitas dalam mengahadirkan kehidupan dunia yang ramah, damai dan terbebaskan dari hal-hal yang bersifat destruktif[26]. Büa proposisi semacam ini benar adanya, maka upaya menegakkan tembok tebal dan tinggi yang memisahkan antara yang spritual dengan yang non spiritual merupakan suatu yang sifatnya long shot,

[26] Bahtiar Effendi, Disartikulasi pemikiran Politik Islam, IIIT (The International Institute of Islamic Thought Indonesia), wikipedia berbahasa Indonesia.

kalau tidak bisa dikatakan sebagai utopia. Akan tetapi persoalan sebenarnya bukan terletak pada perdebatan apakah Islam dan politik harus dipisahkan atau tidak bisa (boleh) dipisahkan. Dan karena sebagaian besar pemikir dan praktisi politik Islam terpaku pada soai dipisahkan atau tidak bisa (boleh) dipisahkannya Islam dari persoalan-persoalan keduniawian, pemikiran politik Islam sulit beranjak pada tataran atau artikulasi yang lebih baru, mirip dengan disiplin ilmu pemikiran (filsafat) politik barat, pemikiran mengenai politik Islam juga mengalami situasi stagnan, decay, disartikulatif, bahkan dianggap telah mati atau tidak ada lagi, sebab seperti dalam kasus pemikiran (filsafat) politik barat, yang oleh sejumlah ilmuwan sosial semisal Isiah Berlin, Sheldon Wolin, Levy Strauss, atau David Easton terlalu bergantung pada dan hampir-hampir tidak bisa bebas dari bayang-bayang pemikiran klasik, pemikiran politik Islam juga dasarnya terpenjara pada tiga mad2hab besar, yakni seluruh artikulasi pemikiran politik Islam tidak lepas dari bayang-bayang pemikiran bahwa : (1) Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan; (2) Islam dan politik itu bisa dipisahkan; (3) Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang erat, akan tetapi bentuk hubungannya tidak bersifat legai formalistic, tetapi substansialistik [27]. Tetapi apakah memang sudah menjadi suatu keharusan bahwa sebuah pemikiran hanya bisa dianggap artikulatif atau baru, jika hai tersebut benar-benar bebas dari bayang-bayang paradigma yang sudah ada. Bukankah dalam banyak hai, ilmuwan-ilmuwan sosial itu menjadi besar, menjadi raksasa ilmu pengetahuan, menjadi menonjol karena diri mereka berdiri di atas pundak para pendahulu mereka? Jika kata-kata bijak ini diikuti, tampaknya tidak terlalu menjadi persoalan benar jika seorang pemikir politik Islam masih berada di bawah bayang-bayang tiga madzhab di atas. Sebab dalam banyak hai memang tidak pernah bisa dilepaskan dari masa lampau, dari

[27] Bahtiar Effendi, Op-Cit.

pengaruh hal-hal yang pernah ada, dan sering juga terdengar pernyataan bahwa nothing new under the sky “tidak ada hai baru dibawah kolong langit”. Tidak seorangpun bisa mengklaim secara pasti bahwa pemikiran yang ia bangun, kajian yang ia lakukan, belum pernah ada sebelumnya, hanya keterbatasan informasi yang ada yang menyebabkan ada anggapan bahwa hal-hal tersebut baru atau belum pernah terjamah sebelumnya.

Demikian pula halnya dengan klaim-klaim tentang kebaruan sebuah pemikiran. Untuk itu, rasanya jika memang harus tetap berada pada bayang-bayang ketiga madzhab yang sudah ada dalam membicarakan pekembangan pemikiran politik Islam. Walaupun harus juga diakui bahwa kenyataan seperti ini juga berlaku pada pemikiran atau teori politik barat. Dalam hai ini meskipun Isiah Berlin dalam salah satu tulisannya pernah bertanya “ Does Political Theory Still Exist?” tetap saja ribuan halaman tentang filsafat atau pemikiran politik barat masih ditulis meskipun dalam perspektif yang tidak terlalu jauh dari apa yang pernah ada[28].

Hal lain yang hendaknya disadari adalah bahwa berbeda dengan pemikiran, teori, pendekatan, paradigma atau ilmu sosial yang dikenal, pemikiran politik Islam tampaknya tidak bisa sepenuhnya dianggap ilmu pengetahuan. Alasan utama dari pandangan tersebut adalah bahwa disitu ada sesuatu yang bersifat devine, ilahijah. Berbeda dengan bahan atau rujukan yang dipakai ilmu-ilmu pengetahuan umum, pemikiran politik Islam menjadikan sumber utama Islam Alqur’an dan Sunnah sebagai rujukan. Oleh kalangan tertentu, sejarah Nabi dan para sahabat juga dipakai sebagai parameter dan inspirasi rumusan pemikiran politik Islam. Karenanya merupakan suatu kelaziman jika pemikiran politik Islam tidak bisa sepenuhnya terbebaskan dari bayang-bayang madzhab pemikiran

[28] Bahtiar Effendi, Op-Cit.

yang telah ada, sebab disitu ada klaim kebenaran (truth claim) yang oleh sebagian dianggap berdimensi ilahiyah, bahkan kadang-kadang mempunyai implikasi-implikasi teologis (e.g. teokrasi versus seku/er, santri versus abangan dan lain sebagainya), ini berarti jika seorang pemikir Muslim yang percaya bahwa mendirikan sebuah negara teokrasi adalah perintah agama, maka sampai kapanpun barangkali tidak akan pernah menampilkan pemikiran politik Islam yang bebas dari salah satu madzhab pemikiran Islam yang ada, demikian pula bagi mereka yang berpikiran lain, baik yang bersifat sekuler (karena percaya bahwa wilayah dunia dan agama itu berbeda) maupun yang berada di tengah-tengah bukan teokrasi dan bukan sekuler, pandangan seperti ini barangkali kebaruan atau sebaliknya itu bisa dilihat dan diukur dari artikulasi, ekspresi dan detail yang diberikan di dalam sebuah pemikiran politik Islam.

Memang, ketika diskursus politik Islam diangkat media masa internasional (terutama media Barat) minimal ada dua asumsi yang kurang tepat yang biasa muncul ke permukaan. Pertama; politik Islam di dunia selalu dipandang sebagai hai yang monolitik tanpa keragaman. Kedua; terutama setelah kejadian 11 September, politik Islam dipandang sebagai sebuah gerakan yang mengusung radikalisme dan kekerasan[29], Karena media massa merupakan salah satu sumber informasi yang sangat efektif mempengaruhi opini publik, stereotype négatif tentang politik Islam oleh media, terutama stigma radikal sangat merugikan, tidak hanya bagi para aktivis politik Islam tapi juga umat Islam secara keseluruhan.

Dalam kaitan ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik Islam itu? Guilain Denoeux dalam tulisannya The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam, Middle East Policy, Vol 9 (une 2002)

---

[29] Ahmad Ali Nurdin, Politik Islam Tidak Monolitik, wikipedia berbahasa Indonesia, hal 1

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik Islam adalah bentuk gerakan yang dilancarkan oleh individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai tujuan politik atas ñama Islam. Artinya, semua gerakan baik itu yang radikal, modérât atau liberal sekalipun ketika memperjuangkan kepentingan politiknya mengatasnamakan Islam disebut dengan politik Islam[30]".

Para aktivis gerakan politik Islam ini memandang Islam sebagai sumber ideologi politik, bagi mereka Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah vertical kepada sang pencipta, tapi Islam juga mengatur seluk beluk interaksi kehidupan umatnya di dunia termasuk politik. Nampaknya gerakan politik Islam ini merupakan fenomena masyarakat Muslim modern, yang mana gerakan ini timbul karena interaksi umat Islam dengan peradaban barat, baik itu persinggungan militer, politik, ekonomi, budaya dan intelektual, yang dalam dua abad terakhir menjadi sangat kuat dan menjadi hegemoni peradaban dunia.

Sebagaimana Islam yang mempunyai banyak variasi interpretasi dan melahirkan berbagai macam madzhab dan pemikiran dari yang tekstualis sampai yang kontekstualis nonliteral, gerakan politik Islam juga mempunyai wajah yang variatif. Hai ini wajar karena masing-masing gerakan politik Islam di dunia merupakan respon masyarakat Muslim lokal terhadap perkembangan sosio politik yang mengitarinya, karena itu tidak heran kalau gerakan politik Islam di negara-negara Timur Tengah tidak bisa disamakan dengan gerakan politik Islam di kawasan Asia Tenggara, begitu juga aktivitas kaum politik Islam di Eropa akan berbeda dengan gerakan yang sama di

[30] Gullain Denoeux, The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam, Middle East Policy, Vol 9, June 2002.

benua lain, karena memang situasi sosio politik dan tantangan yang dihadapinya berlainan.

Kaitan dengan gerakan politik Islam berdasarkan sosio politik dan tantangan yang dihadapinya dikaitkan dengan komunitas Muslim yang ada di negara Singapura, yang notebenenya merupakan komunitas melayu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, bagaimana kebijakan pemerintah Singapura dalam pandangannya terhadap politik Islam.

Sebagaimana diketahui pemerintah Singapura sangat membatasi ruang gerak dari publik, dan kebebasan pers sangat dibatasi, merupakan pemerintah yang otoriter serta memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan (politik). Hal itu terbukti sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Is bin Muhamad bin Semit pimpinan MUIS, bahwa banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura yang berkaitan dengan kehidupan Umat Islam antara lain; larangan pemakaian pengeras suara, terutama pada saat shalat subuh, bahkan juga shalat wajib lainnya, karenanya jangan harap dapat mendengar suara adzan di Singapura. Aturan lainnya adalah jangan mencoba-coba berbicara masalah politik di mesjid, apalagi sampai mencela atau mengkritik kebijakan pemerintah Singapura, pernah seorang mubaligh Indonesia sampai diperingatkan ketika dalam tablighnya menyinggung masalah politik, selain itu juga dilarang menyentuh masalah adat istiadat dan agama lain.

Dati segi sosio politik ini madzhab mana yang dipakai oleh komunitas Muslim melayu Singapura yang merupakan penduduk asli dengan sistem pemerintahan yang dikuasai etnis Cina, dimana pemerintahannya sangat otoriter dan allergi terhadap kebebasan

publik dan pers tersebut, apakah gerakan politik yang modérât atau radikal.

Kalau boleh dilihat sebagaimana diketahui dari latar belakang terbentuknya negara Singapura adalah merupakan pemisahan dari federasi Malaysia yang ditimbulkan dari akibat bentrokan etnis Cina dan etnis Melayu yang merupakan kaum Muslim sehingga memisahkan diri membentuk negara Singapura, yang menjadi alasan mengapa pemerintah Singapura menjadi paranoid dan membatasi publik dan pers.

Sebagaimana diketahui negara Singapura meskipun kecil tapi mempunyai pengaruh yang besar di kawasan Asia Tenggara, jika mendengar ñama Singapura, mungkin sikap negara-negara Islam akan berbeda dibandingkan dengan ñama Israel, padahal kedua ñama tersebut sama mengerikannya itu semua tidak lain adalah karena eratnya keterkaitan antara kedua ñama tersebut, bahkan hampir di semua sektor kehidupan mulai dari pertahanan negara, bisnis sampai bidang sosial.

Dari sisi sejarah Singapura memang mempunyai pengalaman tidak mengenakkan. Pada waktu perang dunia II, Jepang menyerang dan dilanjutkan dengan Inggris, kemudian pada tahun 1965 saat pemisahan Singapura dari Federasi Malaysiapun berlangsung dalam suasana perselisihan, sejak itulah Singapura kerap memonitor situasi kawasan seperti perang Vietnam, Kamboja, dan Laos serta stabilitas politik di Thailand, Malaysia, Indonesia dan Myanmar. Sampai kinipun ketika issu teroris lantang diteriakkan dunia internasional yang agak menyudutkan Islam, Singapura ikut merasa terancam. Sebuah negara yang mayoritas beretnis Cina diapit langsung dua negara besar yang mayoritas penduduknya Islam.

Ketakutan berlebihan (paranoid) inilah yang kemudian mendorong Singapura menjadikan sektor pertahanan menjadi kunci utama agenda nasionalnya. Pihak kementrian pertahanan negeri itu tegas mengatakan bahwa di sektor pertahanan Singapura cuma punya

satu tujuan; pertahanan total di segala aspek di masyarakat, sehingga pemerintah Singapura menganggarkan dana yang paling besar untuk sektor pertahanan dan militer dalam pembelanjaan perangkat perang seperd tank modern, pesawat tempur serta kapal perang. Hai tersebut menjadi pandangan yang cukup fantasis, karena negara-negara di dunia mulai bergeser pada bidang yang terkait dengan ekonomi, perdagangan dan investasi, apalagi sejak 1996 dunia dan khususnya Asia tenggara dilanda gelombang krisis, namun pemerintah Singapura memprioritaskan bidang militer dengan anggaran yang paling besar.

Dengan anggaran itu, kekuatan militer Singapura terlihat tidak proporsional dan bisa menjadi ancaman di Asia Tenggara, betapa tidak dengan adanya kerjasama satelit intel Singapura dan Israel saja sudah spontan membuat warga Malaysia tersentak, karena memang sepanjang sejarah Malaysia dan Singapura memang tidak pernah lepas dari konflik antara bangsa Melayu dengan etnis Cina, dan Malaysia sendiri jelas alergi terhadap Israel, sehingga menurut DR. Azmi Hasan seorang pakar teknologi dari Universitas Teknologi Malaysia menyebutkan bahwa kerjasama satelit intelejen tersebut dapat menambah ketegangan antara Malaysia dan Singapura, bahkan juga Asia Tenggara, dan jangan salahkan siapapun kalau seluruh penduduk di Asia Tenggara mengkhawatirkan keamanan negara masing-masing, karena mereka merasa keamanannya terusik karena kerjasama tersebut[31].

Israel memang selalu menggunakan alasan konflik Timur Tengah untuk terus meningkatkan anggaran militernya, demikian pula alasan serupa yang dilontarkan Singapura. Kemiripan alasan soai pertahanan itulah yang barangkali makin mengeratkan kerjasama

---

[31] Republika, Israel di Asia Tenggara, Jum'at 10 Januari 2003, http;//www.republika.co.id/

pertahanan Singapura dan Israel, dua negara kecil dengan anggaran militer paling besar.

Demikianlah terlepas dari letak geografinya yang berjauhan Singapura dan Israel ternyata memüiki kesamaan dan kerja sarna erat yang terjalin karena alasan yang sama yaitu merasa terancam dengan negaranegara Muslim tetangganya.

Disamping pemerintah Singapura yang membatasi ruang publik dan pers dari kehidupan politik, faktor sosio politik lainnya yaitu adanya pengaruh dari konsep nilai-nilai Asia (Asia Value) yang dalam ilmu politik belum ada kesepakatan yang jelas, karena setiap negara mempunyai budaya politik yang khas dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik demokrasi modern di sebuah negara, begitu pula dengan negara Singapura. Yang dimaksud dengan nilai-nilai Asia itu adalah sikap hormat kepada pimpinan (senioritas), kerja keras, memaafkan, menganggap pemimpin merupakan wakil Tuhan di bumi, hormat kepada orang yang lebih tua dan menghindari konfrontasi bila terjadi perbedaan pendapat [32].

Praktik konsep nilai-nilai Asia yang diyakini penduduk Singapura ialah dengan menempatkan posisi Lee Kwan Yew sebagai penditi Singapura dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam budaya politik. Lee Kawan Yew adalah pemimpin senior yang sudah mengundurkan diri dari kancah politik nasional, tapi pamor kepemimpinannya masih sangat kuat karena siapaun yang menjadi perdana mentri Singapura harus mendapat restu dari Lee Kwan Yew.

Demikianlah, memang benar bahwa politik Islam itu mempunyai wajah yang berbeda sesuai dengan madzhab dan sosio politik yang

---

[32] Eddy Maszudi, Op-cit.

mempengaruhinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Nabeel Jabbaor dalam bukunya The Many Faces of Islam (2003) yang menjelaskan bahwa bagaimana Islam mempunyai wajah yang berbeda-beda disetiap negara, karena masing-masing negara mempunyai interpretasi tersendiri tentang Islam termasuk gerakan poltiknya[33].

Masalah yang menjadi perhatian dunia sekarang ini adalah gerakan politik Islam yang cenderung radikal dan melakukan kekerasan dalam setiap kegiatannya, seperti adanya serangan terhadap simbol-simbol barat seperti kejadian 11 September WTC, bom Bali I dan II, serangan bom di London, meskipun belum jelas siapa pelakunya tapi sering diidentikkan dengan gerakan politik Islam radikal. Inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Singapura yang kepentingan-kepentingan Amerika (negara-negara barat) banyak terdapat di sana.

Media (khususnya media barat) nampaknya kurang mengambil perhatian pada gerakan-gerakan politik Islam yang modérât yang sering menyuarakan perdamaian dan anti kekerasan lewat organisasi -organisasi Islam modérât seperti di Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, PKS, PBB, PPP, di Malaysia seperti PAS, di Singapura seperti PKMS dan lain-lainnya, yang berusaha menyalurkan aspirasinya lewat jalur resmi demokrasi yaitu melalui kompetisi pemilihan umum dan mendirikan partai politik.

Agaknya poin-poin yang sudali disebutkan di atas yang dapat mewarnai kehidupan politik Islam komunitas Muslim Melayu Singapura sehingga dapat mengurangi image negative tentang politik Islam, sehingga dapat menjadi survive menjalankan prinsip dan nilai-nilai kehidupan Islam dengan baik dan sukses. Dan gerakan-

---

[33] Ahmad Ali Nurdin, Politik Islam Tidak Monolitik, Op-cit.

gerakan Civil Society dan partai politik berbasis Islam yang moderai di selurh dunia harus terus mengkampanyekan dirinya sebagai gerakan yang anti kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan partai menjadi the rule of the game democracy dalam menyuarakan kepentingan politiknya.

Untuk lebih mendalam tentang pembahasan politik Islam di Singapura, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pada subbab selanjutnya akan dibahas tentang lembaga-lembaga Islam yang mengurus tentang aspirasi dan nilai-nilai kehidupan Islam bagi komunitas Muslim Melayu yang diakomodasi oleh pemerintah Singapura.

C. Lembaga- Lembaga Islam di Singapura

Berbicara mengenai lembaga-lembaga Islam yang mengurus aturan-aturan dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi komunitas Muslim Melayu di Singapura adalah sebagai berikut :

1. Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Majlis Ugama Islam Singapura (MUÍS), adalah suatu lembaga agama Islam Singapura yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang keanggotaannya pada tahun 1968 yang ketika itu penetapan hukum pemerintahan yang berkaitan dengan umat Islam (AMLA) sedah berlaku.

Lembaga Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), ini merupakan lembaga sebagai penasehat presiden Singapura dalam mempersatukan pemerintah dengan komunitas Muslim Singapura atau dengan kata lain merupakan kepanjangan tangán dari pemerintah Singapura dalam menjalankan petnerintahan yang berkaitan dengan urusan kehidupan komunitas Muslim Singapura, yang menyangkut berbagai aspek kehidupan baik dari segi

administrasi zakat, aktifitas dakwah, pembangunan masjid dan pengelolaannya (Management), masalah pendidikan dan pendirian madrasah-madrasah, pengeluaran fatwa-fatwa, masalah santunan keuangan bagi fakir miskin dan kebutuhan masyarakt Islam lainnya, sampai kepada ketetapan bantuan dana pada sebuah organisasi.

Lembaga Majlis Ugama Islam Singapura rumusan-rumusan, kebijakan dan rencana operasional dan dakwahnya diputuskan secara menyuluh oleh anggota-angotanya yang terdiri dari Anggota MUIS, Mufti dari Singapura, Seorang yang direkomendasikan oleh tokoh Muslim Affairs dan seorang lagi yang direkomendasikan oleh organisasi Muslim anggota dewan yang diangkat oleh presiden. Kesemua aturanaturan, kebijakan dan kegiatan-kegiatan (program) tersebut bertujuan untuk menjadikan komunitas Muslim Singapura menjadi komunitas Muslim yang luar biasa dan cemerlang sesuai dengan tujuan negara Singapura dan untuk meluaskan dan memperdalam komunitas Muslim Singapura menjadi mengerti dan mempraktekkan ajaran agama Islam sehingga menjadikan Singapura negara dan bangsa yang baik.

Untuk lebih jelasnya, nanti akan diuraikan pada bab ketika membahas peranan MUIS secara menyuluruh pada bab empat..

2. Mahkamah Syari'ah Singapura

Mahkamah Syari'ah Singapura didirikan pada tahun 1955 hasil dari kajian sebuah badan kuasa yang dibentuk Pemerintah Singapura. Badan kuasa ini terdiri dari pakar Undang-undang, kadi-kadi dan para ulama setempat, dari hasil kajiannya tercipta suatu akte yang dikenal dengan Muslim Ordinance yang dijadikan undang-undang pada 30 Mei 1957 dan akta ini yang digunakan Mahkamah Syari'ah sampai tahun 1966. Kemudian pada tahun 1966 Akta Pembukuan Undang-Undang Islam (AMIA) diperkenalkan dan menggantikan

Akta Muslim Ordinance, akta ini diubah untuk dibubukan lagi sistem pembukuan Undang-undang Islam Singapura.

Pada tahun 1999, akta ini kemudian diperbaharui dan ditambah lagi dengan beberapa klausul yang sesuai dengan tuntutan keadaan sekarang (masa kini). Dengan pembaharuan ini, meningkatkan lagi kewenangan Mahkamah Syari'ah untuk menyelesaikan kasus-kasus tuntutan cerai dan issu-issu yang berkaitan dengan perceraian seperti masalah pengurusan anak, harta gono gini, masalah lainnya.

Mahkamah Syari'ah adalah sebagai tonggak yang berusaha memproses penyelesaian pihak-pihak yang bersengketa dengan cara adii dan saksama, karenanya yang menjadi falsafah dari Mahkamah Syari'ah ini adalah senantiasa menegakkan keadilan dan berusaha menyelesaikan kasus-kasus dengan cara adii sesuai dengan ayat-ayat Alqur'an surat An Nisa ayat 135 yang berbunyi :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilab kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun ierbadap dirima sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [361] Kay a ataupun miskin, Maka Allah lebih tabu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa najsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. "

Sabda Nabi saw yang berbunyi :

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap pimpinannya, seorang Amir (ketua negara) adalah pemimpin dan ia bertanggung Jawab terhadap rakyalnya. Seorang lelaki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Seorang wanita

(¿steri) adalah pemimpin terhadap rum ah tangganya dan anak-anaknya dan ia bertanggung jawab terhadap pimpinannya.. "

Adapun mengenai konsep perkawinan menurut Mahkamah Syari'ah adalah sesuai dengan konsep Islam yakni bukan hanya berdasarkan cinta semata-mata dan memenuhi tuntutan naluri hawa nafsu saja, tetapi lebih dari pada itu yaitu bahwa perkawinan adalah merupakan fitrah dan ibadah, menjaga kehormatan, sumber pembangunan individu dan negara, latinan kesabaran (sebagai suatu jihad), kasih sayang, dan memperluas silaturrahmi. Dimana konsep dan tujuan ini dimaksudkan menjadi pedoman dan pegangan hidup bersama setiap pasangan yang membentuk rumah tangga, dan konsep ini perlu dipanami dan dihayati agar rumah tangga yang dibina dapat menjadi mahligai yang bahagia dan kekal di dunia dan akhirat.

Mengenai perceraian, konsep Mahkamah Syari'ah Singapura sesuai dengan konsep di dalam Islam yakni berdasarkan pada Alqur'an surat An Nisa ayat 19 yang berbunyi :

"...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikanpadanya kebaìkanyang banyak".

Sedangkan dari hadits Ibnu umar.r.a yang diriwayatkan Abu dawud dan Al Hakim yang berbunyi :

"Perbuatan halal yang dimurkaiAllah ialah talak".

Ayat Alqur'an dan hadits di atas dengan jelas memberikan kita penjelasan bahwa perceraian merupakan suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah swt, dan agama Islam tidak menggalakkan

umatnya bercerai berai, karena dapat mengakibatkan implikasi yang négatif kepada pasangan itu sendiri, anak-anak, keluarga maupun masayarakat umumnya.

Amanah dan tanggung jawab ini hanya dapat dilaksanakan oleh kedua pasangan suami isteri dengan baik dan sempurna, jika keduanya menjadikan dasar ìkatan atau perjanjian yang suci ini dengan bersumber pada iman dan taqwa kepada Allah swt, selagi kedua pasangan ini menjadikan sumber pegangan mereka berpedoman kepada ajaran Islam, dan tujuan serta konsep perkawinan yang didambakan akan kekal hingga akhir hayat.

Mengenai prosedur berperkara pada Mahkamah Syari'ah Singapura, ada beberapa peringkat atau tahapan yang dilalui oleh pasangan yang menyelesaikan perkara di Mahkamah Syari'ah ini. Peringkat-peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peringkat Pengaduan

Pada tingkat ini pasangan atau individu yang ingin membuat pengaduan di Mahkamah Syari'ah berkaitan dengan masalah rumah tangganya perlu membawa dokumen-dokumen atau surat-surat :

i. Kartu Pengenalan diri (KTP)
ii. Buku pernikahan (asli)
iii. Buku lahir anak-anak (dibawah umur 21 tahun)
iv. Tempat pendaftaran ditujukan pada; tingkat empat , bangunan MCYS 512 Thomson Road Singapura 298136

Setelah pasangan mendaftarkan pengaduannya, kemudian selanjutnya diproses pada tingkat kaunseling.

b. Peringkat Kaunseling

Setiap pasangan perlu melalui beberapa sesi pada tingkat kaunseling ini dalam jangka 2-4 bulan, dan Mahkamah Syari'ah menyediakan suatu team kaunseling bagi pasangan yang mempunyai masalah rumah tangga. Team kaunseling ini diwajibkan kepada setiap pasangan yang membuat pengaduan di Mahkamah Syari'ah yang bertujuan untuk membantu pasangan menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga yang dihadapi, begitu juga dengan segala implikasinya yang perlu dilalui dan pihak kaunselor membantu memberi masukan-masukan atau alternatif lain dalam mengatasi persoalan yang ada selanjutnya memperkokoh kembali rumah tangga yang telah lama dibina tersebut, kalau di Indonesia semacam (BP 4).

Dalam tingkat kaunseling ini, jika pasangan dapat menyelesaikan permasalahannya maka kasus dapat ditutup di peringkat ini, atau disalurkan kepada badan Islam yang lain untuk mendapatkan bantuan dan nasihat selanjutnya, tetapi jika pasangan atau salah seorang dari pasangan tersebut telah membuat keputusan untuk meneruskan perceraian nya, maka kasus mereka akan dilimpahkan ke peringkat Mahkamah, dalam hai ini permohonan untuk berpisah dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Permohonan Cerai Melalui Kadi

Permohonan perceraian melalui kadi hanya dapat dilakukan jika pasangan memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Pasangan tidak mempunyai anak dan rumah bersama.
b. Pasangan telah setuju jumlah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang perlu dibayar oleh suami kepada istri.

Jika pasangan memenuhi syarat-syarat di atas, maka pasangan dapat disetujui untuk membuat pendaftaran perceraian mereka melalui kadi, dalam hai ini pihak kaunselor akan melayangkan surat persetujaun pasangan tersebut untuk berpisah dan menetapkan tanggal pendaftaran cerai di depan kadi, dan pada pasangan ini diharuskan membawa surat-surat berikut :

a. Dua buku pernikahan (asli)
b. Dua orang saksi (lelaki islam berusia 21 tahun ke atas, dan kartu pengenalan saksi)
c. Uang pendaftaran cerai
d. Pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah.

2. Permobonan Cerai Melalui Saman

Setiap pendaftaran cerai di Mahkamah harus dilakukan dengan cara membuat saman. Pendaftaran ini dibuat di Mahkamah Syari'ah bertempat di tingkat dua bangunan MCYS. Di tingkat ini pasangan dihaluskan melakukan beberapa persyaratan seperti berikut :

a. Plaintif (suami atau isteri) yang membuat saman diharuskan membayar pendaftaran saman, mengisi borang penyataan kasus (case statement) dan mengangkat sumpah.
b. Pegawai Mahkamah akan memberikan salinan saman kepada plainttfbetszma. tanggal sesi pengantaran.
c. Defendan (suami atau isteri) diharuskan menandatangani surat saman yang telah dikeluarkan oleh pasangannya dan mengisi borang pernyataan pembelaan (defence statement) yang disediakan (jika hadir pada waktu saman dibuat).
d. Jika pihak defendan tidak hadir pada waktu saman dibuka, maka pegawai Mahkamah akan menyerahkan saman tersebut kepada defendan di alamat yang diberikan.
e. Setelah menerima surat saman, defendan dikehendaki mengisi borang pernyataan pembelaan (defence statement)

c. Peringkat Pengantaraan

Setelah saman dibuat, kedua pasangan diharuskan hadir ke Mahkamah bagi sesi pengantaraan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di dalam saman tersebut, dengan membawa persyaratan :

a. Kartu Pengenal.
b. Skim perumahan umum (public Housing Scheme).
c. Surat dari HDB yang berkaitan dengan kedudukan rumah fiat.
d. Pembayaran untuk pendaftaran cerai dan surat perintah Mahkamah.
e. Buku akuntan Bank (bagi pihak isteri)
f. Buku kelahiran anak-anak.

Pada tingkat ini, issu perceraian dan perkara-perkara yang berhubungan dengan perceraian, seperti anak, rumah, harta gono-gini yang lain, tuntutan nafkah iddah dan mufah akan dibicarakan, dan seorang pengantara yang tidak memihak kepada pasangan tersebut akan membantu mencari kata sepakat bagi penyelesaian masalah mereka.

Jika kedua-duanya dapat mencapai satu persetujuan pada tingkat ini, maka pengantara akan melayangkan surat persetujuan bersama, dan kedua pihak akan mengangkat sumpah di hadapan hakim bagi pengesahan tersebut, seterusnya hakim akan mengarahkan pendaftaran cerai, maka selesailah proses perceraian tersebut.

Adapun tujuan adanya peringkat perantaraan ini adalah:

1. Membantu pasangan menyelesaikan proses perceraiannya dengan jalan yang singkat (jika keduanya ada persetujuan).
2. Bagi pasangan yang ingin kasusnya diselesaikan di peringkat ini, harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Kedua pihak setuju untuk berpisah.
b. Kedua pihak setuju dengan issu nafkah iddah dan mut'ab[34].
c. Kedua pihak setuju dengan hak penjagaan anak.
d. Kedua pihak setuju dengan kedudukan rumah (flat). atau harta pencaharian (gono-gini).

3. Pasangan tidak perlu melalui proses pembicaraan di dalam Mahkamah, dengan ini dapat menghindari tekanan jiwa dan perasaan terhadap diri dan anak-anak.
4. Membantu pasangan untuk memahami segala issu-issu yang berkaitan dengan perceraian dengan lebih terperinci lagi, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat.
5. Pasangan dapat menghemat biaya tambahan jika kasus mereka selesaì diperingkat ini.
6. Jika berlaku issu-issu yang berkaitan dengan anak dan rumah setelah bercerai, masalah ini akan lebih mudah diperbincangkan.
7. Tiada paksaan, karena keputusan perceraian ditentukan oleh pasangan, bukan Mahkamah.
8. Segala keaiban individu dapat dihindarkan dari terbongkar selama dalam pembicaraan.

Peringkat ini sangat digalakkan, karena merupakan salah satu proses di dalam agama Islam khususnya dalam mencari penyelesaian secara damai. Hal itu ditegaskan dalam firman Allah swt surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi:

---

[34] Nafkah iddah, adalah nafkah berupa uang yang diwajibkan kepada suami atas isterinya dari semenjak suami mengucapkan talak samapi dengan masa iddah habis sebanyak tiga kali suci,sedangkan mut'ah adalah sebagai bayaran pampas an atau kenangkenangan yang diberikan pihak suami kepada bekas isterinya yang diceraikan.

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyu\ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika katnu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyu% dan sikap tak acuh), Maka Sesunggubnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Islam menggalakkan setiap permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik, karena dengan ini akan hilang segala sifat permusuhan, benci membenci, tuduh menuduh, salang mencela diantara dua pihak, dan juga dapat mewujudkan sifat saling hormat menghormati diantara satu sama lain meskipun berpisah, sehingga issu berakaitan dengan kebijakan anak dapat diatasi dengan seksama.

Jika pada tingkat ini tidak dapat dicapai kata sepakat maka kasusu diteruskan ketingkat Pra Pembicaraan (PTC).

d. Peringkat PTC (Pra Pembicaraan)

Pada peringkat ini, pasangan akan bertemu dengan seorang pegawai pendaftar untuk membicarakan proses selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan; hak penjagaan anak-anak, hak melihat anak-anak (access) dan mengubah permohonan kasus dan pernyataan pembelaan, membatalkan atau memilah sebagian keterangan atau dokumen yang tidak relevan,melanjutkan atau mengurangi waktu pembicaraan, mengenyampingkan perintah Mahkamah atau permohonan, menimbang permohonan yang penting.

Pada tingkat ini kasusnya hanya akan didengar dalam waktu satu sampai dua bulan. Pasangan juga digalakkan untuk mendapatkan bantuan dari pengacara, karena banyak persoalan-ppersoalan yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibicarakan pada peringkat ini. Bagi pasangan yang ingin memohon untuk mendapatkan perintah sementara berkaitan dengan hak penjagaan anak sebelum tingkat pembicaraan, pasangan ini perlu membuat permohonan dengan menggunakan affidavit (keterangan) kepada Mahkamah dalam tempo tiga hari.

e. Peringkat Pembicaraan

Setelah melalui proses pengantaraan dan PTC, jika pasangan masih belum mencapai kata sepakat, maka suatu tanggal pembicaraan akan ditetapkan untuk kasus tersebut. Di peringkat ini Mahkamah akan mendengar segala tuntutan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak disepakati bersama seperti; perceraian, nafkah iddah, mut'ah, hak penjagaan anak-anak, harta gono gini.

Ada beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh pasangan pada waktu menghadiri peringkat pembicaraan ini, sebagian dari aturan dan peraturan yang perlu diperhatikan adalah:

a. Mendapatkan team penasehat hukum, bagi pihak yang tidak mempunyai kemampuan boleh mengajukan permohonan kepada Biro bantuan penasehat hukum. Permohonan team penasehat hukum ini dibuat pada waktu tingkat pengantaraan atau pra pembicaraan.
b. Bagi pasangan yang tidak mau mendapatkan team peenasehat hukum, mereka tetap berhak mewakili diri mereka sendiri.
c. Membawa semua dokumen-dokumen, bahan bukti atau dalli (hujjah) yang bersangkutan di dalam pembicaraan,

sebagaimana yang diarahkan oleh pendaftar di peringkat PTC.

d. Berpakaian sopan dengan menutup aurat sewaktu menghadiri pembicaraan.
e. Sopan sewaktu berada di dalam Mahkamah.

f. Peringkat Hakam

Hakam adalah seorang wakil yang dilantik oleh pihak suami atau pihak isteri sebagaimana yang diarahkan oleh hakim Mahkamah, yang diberi kuasa dan tanggung jawab tertentu dalam menyelesaikan permasalahan suami isteri tersebut, ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nissa ayat 35 yang berbunyi :

"Dan jika kamu khawatìrkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Sebagian kasus-kasus yang telah dibicarakan oleh hakim harus melalui proses hakam, hal-hal yang menyebabkan keharusan pasangan diwakili oleh hakam adalah sebagai berikut; isteri memohon untuk berpisah atas dasar ta'lik, tetapi setelah dibicarakan, hakim mendapatkan ta'lik tersebut tidak sabit; suami tidak mau menceraikan isterinya dan belum melafadzkan talak, tetapi isterinya tetap ingin bercerai; hakim merasakan pasangan ini perlu melalui proses hakam.

Sedangkan peranan hakam adalah; menerangkan kepada pasangan suami isteri peranan yang dimainkan oleh hakam dalam menyelesaikan kebolehan mereka menurut pandangan Islam;

membuat kebijakan tentang latar belakanag pasangan suami isteri yang terlibat dan berbicara dengan pasangan tersebut; mengkaji dan meneliti nota pembicaraan untuk mendapatkan ketetapan dan fakta-fakta secara lebih menyeluruh; menerangkan kebaikan kehidupan berumah tangga jika berdamai dan keburukan perceraian dan akibatnya terhadap individu dan anak-anak, masyarakat, harta benda, uang simpanan bersama, harta gono-gini, beban pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan masalah sosial; berusaha mendamaikan mereka; membuat laporan kepada Mahkamah hasil perbincangan mereka dengan pasangan tersebut dan memohon rumusan mereka dijadikan Pertimbangan Mahkamah.

g. Peringkat Lembaga Rayuan

Setelah hakim membuat keputusan berkaitan dengan hal-hal perceraian seperti hak penjagaan anak, harta gono gini dan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, dan jika salah satu dari pasangan yang dibicarakan tidak merasa puas dengan keputusan yang telah ditetapkan, maka pasangan tersebut berhak membuat persetujuan banding (rayuan) kepada Lembaga rayuan yang terletak di Majlis Ugama Islam Singapura, disinilah peranan MUÍS yang berkaitan erat dengan lembaga Mahkamah Syariah yakm sebagai lembaga untuk mempertimbangkan proses perceraian pada tingkat banding.

3. Lembaga Pendidikan Alqur'an Singapura (LPQS)

Ide untuk pembentukan sebuah pusat tahfidz Alqur'an timbul pada awal tahu 90-an, beberapa tahun kemudian terbentukan Lembaga Pendidikan Alqur'an Singapura (LPQS). Antara tujuan

utamanya ialah untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura mendalami dan menghafal Alqur'an. Pada tahun 1999, bangunan lama Masjid kampung Siglap yang sudah terkenal sebagai pusat menghapal Al-Qur'an dipilih sesuai dengan kondisi pemukimannya dan kesyahduan masjid yang jauh dari hiruk pikuk kota, latar belakang ini amat sesuai untuk kegiatan menghafal Al-Qur'an.

Bangunan lama itu telah direno vasi dengan menelan biaya hampir $30.000, Majlis Ugama Islam Singapura telah mengumumkan peluncuran Program menghafal Aìqur'an di majlis Zikrah Hijrah 1420 H pada 16 April 1999. Dan pada tanggal 30 Mei 1999, Pusat Tahfiz Aìqur'an Singapura mulai membuka kelas untuk kumpulan pelajar tahap I, dan pada tanggal 18 Juli 1999 Pusat Tahfidz Alaqur'an Singapura telah dibuka secara resmi.

Dengan visi dan misi, untuk melahirkan generasi huffaz dan untuk meningkatkan lagi kesadaran tentang pentingnya menghafal Aìqur'an, maka pada akhir tahun pendidikan telah meluluskan sebanyak 52 pelajar dalam ujian dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Hj Maarof Salleh, disaksikan Presiden majlis Ugama Islam Singapura Syed Isa Mohd Bin Semait, Mufti negara Singapura dan Hj Anis Tairan Ketua Lembaga Pentadbir Masjid Kampung Siglap pada tanggal 27 Agustus 2000.

Tentang sistem pembelajaran dibagi atas peringkat kelas sebagai berikut :

a. Peringakat asas yang terdiri dari ; Taman Pengajian Aìqur'an, Kelas Iqra'.
b. Peringkat Pertengahan yang terdiri dari; Kelas Tahsin Qiraah; Praktikal Tajwid, dan Asas Tajwid.

c. Peringkat lanjutan yang terdiri dari :Kelas khatam Aìqur’an, Pengajian Tahfz Aìqur’an, Sijil Tajwid, Kelas Talaqqi Bersanad, Kelas Tarannum Aìqur’an, Kursus Seni Azan, Kelas Terjemah Harfiyah Aìqur’an.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

A. PERINGKAT ATAS

TAMAN PENGAJIAN AL-QURAN
Belajar Al-Quran dengan kaedah 5M: Membaca, Menulis, Menghafal, Mengerti Kalimah & Memahami Surah. Dibimbing oleh guru Iqra’ yang bertauliah. **Bila:** Kelas 1 : Selasa dan Khamis, 3-4 ptg. Kelas 2 : Setiah Ahad, 2-4 ptg. **Bayaran**: Kelas 1 : $45 / bulan Kelas 2 : $30 / bulan **Syarat:** Berumur antara 5-12 tahun.
KELAS IQRA
Bagi yang hendak belajar membaca Al-Quran menggunakan kaedah Iqra’. Para pelajar akan diajar secara individu dan klasikal. Tiada had umur. Kelas untuk wanita, lelaki dan dalam Bahasa Inggeris. 2 sesi setiap minggu. Setiap sesi selama 1 jam. Dibimbing oleh guru Iqra’ yang bertauliah. **Bila**: Kelas Hari Biasa & Hujung Minggu. Pelajar boleh pilih mana-mana 2 sesi. **Bayaran**: $30 (pelajar) $50 (dewasa) / bulan.

B. PERINGKAT PERTENGAHAN

KELAS TAHSIN QIRAAH
Perelokkan bacaan Al-Quran anda. Ikutilah kelas ini. Pelajar akan dilatih membaca juzuk 30 bertajwid. 2 sesi setiap minggu. Setiap sesi selama 1 jam. **Bila**: Kelas Hari Biasa & Hujung Minggu. Pelajar boleh pilih mana-mana 2 sesi. **Bayaran:** $30 (pelajar) $50 (dewasa) / bulan **Syarat:** Mampu membaca Al-Quran.

PRAKTIKAL TAJWID
Ingin melentur lidah anda untuk membaca Al-Quran dengan baik? Kursus selama 11 minggu ini adalah untuk anda. Setiap minggu, pelajar akan diberi latihan lisan bertubi untuk setiap hukum Tajwid yang penting. Dibimbing oleh Ust Md A2tni Ismail & Ust Omar Mokti Al- Hafiz dari Malaysia. **Bila:** Setiap Khamis, 8-10 mlm (bermula 2 Mac) Setiap Sabtu, 5 -7 mlm (bermula 4 Mac) **Bayaran:** $100 utk pelajar / $160 utk dewasa **Syarat:** Sudah boleh baca Al-Quran

ASAS TAJWID
Pelajarilah ilmu tajwid dengan mengikuti kursus sebanyak 3 modul ini. Setiap modul adalah selama 10 sesi. Dibimbing oleh Ust Abu Mardhiyah (B.A. Maahad Tahfiz Universiti Al-Azhar) **Bila:** Sabm, 5.30 ptg -7 mlm. 2 kali sebulan. **Bayaran:** $100 **Syarat:** Lancar membaca Al-Quran.

C. PERINGKAT LANJUTAN

KELAS KHATAM AL-QURAN
Peluang untuk khatam Al-Quran dengan guru yang bertauliah. 2 sesi setiap minggu. Setiap sesi selama 1 jam.
Bila: Kelas Hari Biasa & Hujung Minggu.
Pelajar boleh pilih mana-mana 2 sesi.
Bayaran: $30 (pelajar) $50 (dewasa) / bulan
Syarat: Mampu membaca Al-Quran dengan baik.

PENGAJIAN TAHFIZ AL-QURAN
Menghafal serta memahami apa yang dihafal. Teknik menghafal akan disesuaikan dengan personaliti pelajar. Pelajar bukan sahaja menghafal tetapi akan memahami juga apa yang dihafal. Sukatan hafalan mengikut kemampuan pelajar. 2 sesi setiap minggu. Setiap sesi selama 1 jam. Dibimbing para huffaz yang bertauliah.
Bila: Kelas Hari Biasa & Hujung Minggu.
Pelajar boleh pilih mana-mana 2 sesi.
Bayaran: $30 (pelajar) $50 (dewasa) / bulan
Syarat: Perlu lulus ujian kemasukan.

SIJIL TAJWID
Ini adalah tahap terakhir dalam modul ilmu Tajwid di Darul Quran Masjid Kg Siglap. Kursus ini adalah sebanyak 2 modul. Setiap modul adalah selama 10 sesi. Dibimbing oleh Ust Salehuddin Omar (B.A. Maahad Tahfiz Universiti Al-Azhar)
Bila: Ahad, 9.00 pg -1 ptg. 2 kali sebulan.
Bayaran: $500
Syarat: Mempunyai asas Ilmu Tajwid dan lancar membaca Al-Qur'an

KELAS TALAQQI BERSANAD
Peluang untuk membaca Al-Quran dan mengambil sanad dari guru Al-Quran yang tertauliah dari Malaysia.
Bila: Ahad, 9.00 pg - 5 ptg. 2 kali sebulan. (Boleh memilih waktu)
Bayaran: $50 (setiap kelas)
Syarat: Sudah lançar membaca Al-Quran

KELAS TARANNUM AL-QURAN
Belajar melagukan Al-Quran dari pakar tarannum Malaysia, Ust Muhammad Hasri.
Bila: Ahad, 2.00 -4.00 ptg. 2 kali sebulan.
Bayaran: $50
Syarat: Sudah lancar membaca Al-Quran

KURSUS SENI AZAM
Belajar lagu-lagi azan dari pakar tarannum Malaysia, Ust Muhammad Hasri.
Bila: Sabtu, 7.30 - 9.00 mlm. 2 kali sebulan.
Bayaran: $100
Syarat: Sudah lançar membaca Al-Quran

TERJEMAHAN HARFÍYAH AL-QURAN
Pelajari Bahasa Arab melalui Al-Quran dengan tujuan untuk memahami Al-Quran. Dipirnpin oleh Ust Yahya bin Mahamud. Kelas diadakan setiap minggu selama 2 jam.
Bila: Kelas 1 : Hari Jumaat (8-10 mlm) Kelas 2 : Hari Selasa (5 — 7 mlm)
Bayaran: $30 (pelajar) $50 (dewasa) / bulan
Syarat: Mampu membaca Al-Quran dan menulis Rumi dan Arab.

Demikian sekilas tentang Lembaga Pendidikan Alqur’an Singapura (LPQS).

4. Pertemuan Tahunan Mentri-Mentri Agama (MABIMS)

MABIMS adalah sebuah bentuk kesepakatan di tingkat kawasan yang bergerak atas dasar keagamaan bagi memelihara dan menjaga kebajikan masyarakat Islam dengan tidak mencapuri urusan politik negara masingmasing. Nama lengkapnya adalah Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Mentri-Mentri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura.

Sebetulnya kalau dimasukkan sebagai salah satu lembaga yang ada di Singapura tidak relevan, tapi karena menyangkut umat Islam di Singapura dan Singapura termasuk salah satu anggota MABIMS, maka penulis masukkan ke dalam lembaga Islam yang ada di Singapura.

Sejarah awal pembentukan MABIMS dimulai dari persidangan Mentri-mentri Wakaf dan Hal Ikhwal Agama yang ke 4 yang berlangsung pada tanggal 12-14 syawal 1409 atau 17-19 Mei 1989 di Jedah Arab Saudi, sebanyak 41 negara Islam dan beberapa organisasi serta badan-badan Islam menghadiri pertemuan tersebut. Turut hadir pada persidangan tersebut ialah mentri-mentri dari negara Brunei Darussalam Raja Dato Seri Utama Dr.Ustz Haji Mohd Zain Bin Haji Serudin, Mentri Agama Republik Indonesia, Haji Munawir Syadzali, MA, Mentri Agama Malaysia Dato Dr.Mohamad Yusof bin Haji Mohamed Noor.

Ketiga mentri yang nadir telah berkenan memikirkan akan pentingnya mengadakan kerjasama yang lebih erat an tara ketiga negar sebagai langkah maju bagi tercapainya tujuan-tujuan dalam persidangan di Jeddah itu yakni cara-cara meningkatkan dakwah,

aliran-aliran yang mengancam dunia Islam dana penyelarasan antara media-media yang bekerja dalam bidang dakwah.

Setelah diadakan beberapa pertemuan dan kesepakatan di tingkat pegawai tinggi dari ketiga negara, maka diajukan kepada Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam untuk menyetujui menjadi tuan rumah pertama bagi pertemuan tahunan tidak resmi mentri-mentri agama negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, dan Malaysia yang diadakan pada hari Senin, 7 Agustus 1989 di Pusat Dakwah. Republik Singapura menjadi anggota penuh bagi pertemuan tersebut pada tahun 1994, yang sebelumnya hanya diwakili oleh pegawai tingginya saja , kemudian pada pertemuan MABIMS yang ke 5 baru diwakili oleh Mentri yang bertanggung jawab bagi hai ikhwal masyarakat Islam yaitu Abdullah Tarmugi, sehingga Republik Singapura menjadi anggota penuh MABIMS yang berlangsung di Langkawi, Kedah, Malaysia pada hari rabu, 3-4 Agustus 1994 M.

Tujuan Singapura menjadi anggota MABIMS adalah untuk mewujudkan dan mengukuhkan semangat persaudaraan yang sudah ada di kalangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara, sebagai wadah untuk muzakarah, bertukar aturan, pengetahuan, bahan kajian dan kerjasama pengalaman dan kepakaran di kalangan umat Islam di kawasan Asia tenggara dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam meningkatkan dan memantapkan aqidah dan syariah, untuk mengangkat kedaulatan umat Islam Asia Tenggara dalam pengembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan Islam, untuk menjadi model atau contoh kepada umat Islam sedunia tentang satu budaya kerjasama sekawasan yang sukses dalam organisasi, mengatur dan mengurus masalah Islam, dan untuk memahami sistem perundangan dasar dan peraturan pembukuan masalah-masalah Islam di kalangan negara-negara anggota.

Demikian sekelumit tentang MABIMS, yang menurut penulis termasuk bagian dari lembaga-lembaga Islam di Singapura.

4
PERAN MUIS DALAM KEHIDUPAN KOMUNITAS MUSLIM SINGAPURA

A. MUIS dan Latar Belakang Berdirinya Serta Struktur Organisasinya

Majlis Ugama Islam Singapura merupakan suatu lembaga kepanjangan tangán dari pemerintah Singapura dalam kaitannya dengan kehidupan komunitas Muslim di Singapura dalam menjalankan kehidupan seharihari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan lokal (dalam negri) maupun kawasan (Asia Tenggara).

Sebagaimana diketahui dari sejarah tentang berdirinya negara Singapura, adalah merupakan suatu kerajaan kecil di semenanjung Malaysia yang bernama Temasek, dimana penduduknya adalah komunitas Melayu yang beragama Islam. Kemudian diambil alih oleh Raffles dan masa pendudukan Jepang sampai kepada federasi Malaysia sehingga terjadi keributan antara etnis Cina dan Melayu sampai kemudian melepaskan diri membentuk Singapura. Dari segi asai usui negara Singapura bisa dilihat berarti penduduk asli dari negara Singapura adalah komunitas Muslim Melayu, jadi wajar seharusnya komunitas Melayu mendapatkan tempat yang terbaik pada pemerintahan Singapura.

Dari latar belakang berdirinya negara Singapura tersebut, memang menunjukkan bahwa penduduk asli Singapura merupakan komunitas yanag beragama Islam, sehingga aturan-aturan Islam itu sudah berlaku semenjak dahulu sebelum pemerintahan Singapura pada masa sekarang ini.

Untuk mengakomodir dan menyalurkan aspirasi komunitas Muslim tersebut dalam menjalankan kehidupan nilai-nilai Islam baik yang berkaitan dengan ajaran Islam Aqidah dan Syari'ah maupun yang berkaitan dengan pemerintahan maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nanam MUÍS (Majlis Ugama Islam Singapura).

Jadi Majlis Ugama Islam Singapura (MUÍS), dikenal dengan lembaga agama Islam Singapura sebagai suatu badán yang keanggotaannya ditetapkan oleh Undang-undang pada tahun 1968, ketika itu ditetapkan berdasarkan penetapan hukum Islam (AMLA).

Majlis Ugama Islam Singapura merupakan suatu lembaga kepanjangan tangán dari presiden Singapura yang berfungsi sebagai penasehat presiden didalam urusan yang berkaitan dengan komunitas Muslim, sebagai bahan untuk menyatukan antara komunitas Muslim dengan pemerintah Singapura.

Mengenai visi dan misi dari Majlis Ugama Islam Singapura ini adalah, membuat komunitas Muslim yang luar biasa (cemerlang), dengan tekun dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sosial yang berkembang dengan pesât didalam komunitas agama yang pluralistic, negara sekuler dan dunia yang mengglobal (globalisasai dunia), sedangkan misinya adalah untuk memperluas dan memperdalam komunitas muslim Singapura didalam memahami dan menjalankan (mempraktekkan) agama Islam, sehingga menjadi warga dan bangsa yang baik. Visi dan misi tersebut tidak terlepas dari tujuan dari negara Singapura yakni menjadikan suatu negara yang memiliki penduduk yang cerdas, kuat dan cemerlang.

Skala prioritas Majlis Ugama Islam Singapura (MUÍS) adalah merencanakan kegiatan umat Islam, membina dan mengembangkan kehidupan beragama bagi komunitas Muslim Singapura.

Aturan dan kegunaan dari MUÍS, adalah untuk dapat melihat bahwa ada beberapa perubahan yang menarik dari komunitas muslim yang dapat dilihat, dan MUIS bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mengakomodir kegiatan-kegiatan keagamaan, kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan sesuai dengan asas-asas dan tradisi Islam yang termaktub dalam kitab Suci Alqur'an dan Sunnah.

Adapun fungsi MUIS adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Zakat, Wakaf (sumbangan), Diploma atau sertifikasi halal dan aktifitas dakwah.
2. Pembangunan dan pengembangan, pengelolaan administrasi mesjid.
3. Pengelolaan administrasi madarasah dan pendidikan Islam.
4. Mengeluarkan atau memberikan fatwa-fatwa (aturan-aturan agama).
5. Menentukan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kebutuhan masyarakat Islam.
6. Menentukan bantuan dana pada sebuah organisasi.

Kelembagaan MUIS adalah membuat keputusan yang menyeluruh dan bertanggung jawaab membuat rumusan-rumusan, kebijakan dan perencanaan operasional. Kelembagaannya terdin dari anggota Muis, Mufti dari Singapura, seorang yang direkomendasikan oleh mentri dalam urusan Islam, dan seorang yang dinominasikan oleh organisasi Muslim. Anggota-anggota dari lembaga ini diangkat oleh Presiden Singapura.

Adapun struktur organisasi Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah terbagi kepada dua yaitu; komisi fatwa dan kesekretariatan.

Komisi fatwa terdiri dari lima orang anggota, yaitu : Syed Isa Mohd Semait (ke tua/Presiden MUIS), Mohamed Fatris bin Bakaram (sekretaris), Hj. Ali Bin Hj.Mohamed PBM (anggota), Firdaus Bin Yahya (Anngota), Muhammad Fuad Bin Md Aris (anggota), Mohamed Hasbi Bin Hassan (anggota). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini[35]:

MAJLIS ULAMA ISLAM SINGAPURA-FATWA COMMITTEE

Post	Name
Chairman	SYED ISA Mohd semait, PPA(G) 1 lorong 6 toa payoh Singapore 319376
Secretary	MOHAMED FATRIS Bin Bakaram 1 lorong 6 toa payoh Singapore 319376
Member	HJ ALI Bin Hj Mohamed, PBM Bik 297B, Compassvale Street, #06-06 Singapure 542297
Member	FIRDAUSBinYahya Bik 10 Eunos Cresent #16-2725 Singapore 40010
Member	MUHAMMAD FUAD Bin Md ArisBlk 703 Woodlands Drive 40, #04-76, Singapore 730703
Member	MOHAMED HASBI Bin Hassan Pergas, Wisma Indah,448 Changi Road, #03-01, Singapore 419975

[35] Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. 80

Sedangkan bagian (komisi) kesekretariatan terdiri dari delapan anggota, yang susunannya sebagai berikut :
Syed Haroon bin Mohamed Aljunied, PBS (sekretaris), Abdul Ghani bin Abdul Hamid (anggota), Abdul Rahim bin Abdul Jalil, PBM (anggota), Ahmad Dafir bin Hj. Kadir (anggota), Fazal Mohamed bin Abdul Karim (anggota), Hamidul Haq (anggota), Jalaluddin Bin Hassan (anggota), Latief bin Ibrahim (anggota). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut[36]:

MAJLIS ULAMA ISLAM SINGAPURA-APPEAL BOARD

Post	Name
Secretary	SYED HAROON Bin Mohamed Aljunied PB,Pk 1 lorong 6 toa payoh Singapore 319376
Member	ABDUL GHANI Bin Abdul Hamid Blk 364 Tampines st 34, #02-141, Singapore 520364
Member	ABDUL RAHIM Bin Abdul Jalil, PBM c/o Subordinate Courts, 1 Havelock Square Singapure 059724
Member	AHMAD DAFIR Bin Hj Kadir Blk 636 Yishun Ring Road St 61, #10-11, Singapore 760636

[36] Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Member	FAZAL MOHAMED Bin Abdul Karim No: 6 Raffles Quay #14-06, Singapore 048580
Member	MAHMIDUL Haq 544East Coast Road, Singapore 458972
Member	JALALUDDIN Bn Hasan Blk 31 sarana Condo Park, #04-01 Simei Rise Singapore 528779
Member	LATIFF Bin Ibrahim c/o Harry Elias partnership, 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza 1, Singapore 048619

Pada dasarnya struktur organisasi Majlis Ugama Islam Singapura (MUÍS) berada dibawah Ministery Of community Development, Youth And Sports, yang struktur secara keseluruhannya adalah sebagai berikut :

1. Mohammad Alami Bin Musa , dalam jabatan sebagai Presiden MUÍS.
2. Syed Isa bin Mohd bin Semait, jabatan sebagai Mufti.
3. Syed Haroon bin Mohamed Al juneid, PBS, jabatan sebagai sekertaris.
4. Abdul Karim Bin Maidin, jabatan sebagai anggota.
5. Shafawi bin Ahmad, BBM,PBS, sebagai anggota.
6. Hj.Ali bin Hj.Mohamed, PBM, sebagai anngota.
7. Mohammed Faiz Edwin, sebagai anggota.
8. Mubarak bin Salim Abdat, sebagai anggota.

9. Moiz Tyebally, sebagai anggota.
10. Hj. Muhammad Fuad bin Md Aris, sebagai anggota.
11. Noor mohd s/o Abdul Aziz, sebagai anggota.
12. Hj. Pasuni bin Maulan, sebagai anggota.
13. Sallim bin Abdul Kadir, sebagai anggota.
14. Salim bin Abdul Kadir, sebagai anggota.
15. Shaik Alaudeen bin Osman, sebagai anggota.
16. Hj.Yahya bin Shaik, sebagai anggota.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur menegemen team adalah sebagai berikut:

Demikian sekelumit tentang MUIS, latar belakang berdirinya dan struktur kelembagaan dari organisasi MUIS, sedangkan mengenai program kerja dan implementasi organisasi MUIS dalam kehidupan komunitas Muslim akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

B. Program MUIS dan Perannya dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Komunitas

Melayu Singapura

Program kerja MUIS tidak terlepas dari fungsi dan kegunaan dari pada organisasi MUIS sendiri, serta prioritas utama dari program MUIS yakni untuk merencanakan kegiatan umat Islam, membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan komunitas Muslim Singapura menjadi warga negara yang baik dan luar biasa (cemerlang). Demikian pula selain dari prioritas utama tadi, juga tidak keluar dari prinsip-ptinsip dari fungsi MUIS itu sendiri yang berasaskan dari nilai-nilai yang termaktub dalam Alqur'an dan Sunnah. Adapun program-program tersebut antara lain; administrasi

zakat, wakaf (sumbangan), sertifikasi halal dan kegiatan dakwah; pembangunan dan pengembangan administrasi dan pengelolaan keuangan masjid; pengelolaan keungan madrasah dan pendidikan Islam; pemberian fatwa-fatwa tentang aturan-aturan agama; menentukan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kebutuhan masyarakat Islam; menentukan bantuan dana bagi organisasi.

Program MUIS tersebut terbagi kepada tiga bagian :

1. *Islamic Development Cluster* (Pengembangan Islam)

Dalam program untuk mengembangkan umat Islam ini, program-program yang akan dilaksanakan adalah meliputi; pengembangan pendidikan guru-guru (asatizah); pendidikan Islam, pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembinaan pengurus masjid, pembinaan pengelolaan masjid, pembangunan kantor mufty, perencanaan pembangunan masyarakat, penelitian dan pengembangan.

2. *Assets Management Cluster* (Pengelolaan Kepemilikan)

Pada program ini, hal-hal yang menjadi perhatian adalah bidang-bidang tentang pengelolaan (ménagement) yang meliputi ; pengeluaran fatwa-fatwa dan aturan-aturan Islam serta kewenangannya, penerbitan sertifikasi halal bagi roduk-produk makanan, pengelolaan urusan haji, pengelolaan dan pengeluaran zakat dan wakaf.

3. *Corporate Services Cluster* (Kerjasama dalam Pelayanan)

Program ini adalah tentang kerjasama dalam pelayanan di segala bidang seperti bantuan-bantuan yang meliputi; kerjasama bidang komunikasi, keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi, sistem organisasi yang baik (luar biasa).

Untuk lebih jelasnya tentang program-program dari MUIS ini dapat dilihat bagi bagan berikut :
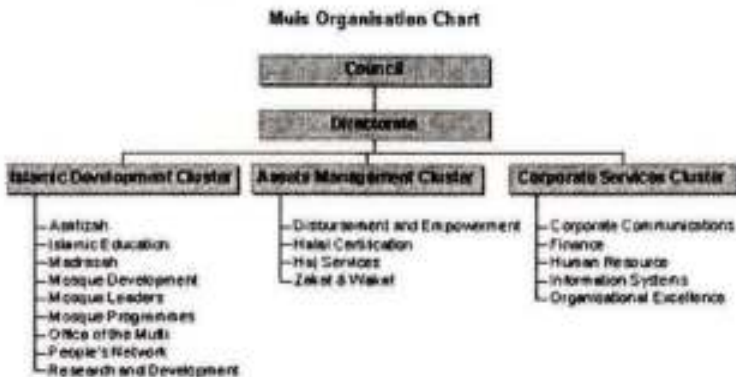
Muís Organisation Chart

Adapun mengenai implementasi dari program-program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. **Islamic Development Cluster (Pengembangan Islam)**

   Contohnya:

   ASATIZAH RECOGNITION SCHEME

WHAT IS THE ASATIZAH RECOGNITION SCHEME (ARS)?

The ARS was set up to enhance the public standing of our religious teachers (asatizah) and to serve as a reliable reference guide for members of the Singapore Muslim community. This scheme applies to all Islamic religious teachers known as “ustaz” or “ustazah” in Singapore to ensure that their knowledge of Islam is

verified and approved by an authorisation body known as the Asatizah Recognition Board.

It is an acknowledgement granted only to qualified Islamic religious teachers and scholars who meet the minimum standards of qualification to preach and teach Islamic religious knowledge either at madrasahs, mosques, private institutions, Malay / Muslim organisations or residences in Singapore.

WHO ARE THE PLAYERS?

The Asatizah Recognition Board (ARB)

A special independent committee, the ARB was formed by Muis. It comprises several senior religious teachers / scholars. They will provide overall directions, approve all nominations or applications, and oversee the professional conduct of all approved asatizah or scholars in the performance of their teachings and religious services to the community.

The ARB is currendy chaired by one of the most respected asatizah, Ustaz AH Hj Mohamad, Chairman of the Khadijah Mosque.

Appeal Panel (AP)

ABOUT DANA MADRASAH

History of Dana Madrasah

Dana Madrasah was set up on 15 October 1994.The purpose of Dana Madrasah is to provied funds to:

a) Supplement asatizah's salaries through the top-up allowance

b) Train teachers and Madrasah's administrators
c) Improve and upgrade teaching facilities through capitation grant
d) Upgrade madrasah's curriculum

Campaign Objectives:

a) Top-up allowance for the asatizah salaries - increase of $456-$600 p.a. per asatizah
b) Capitation grant — increase by $105,000 ($25 per student per year)
c) Teachers Training and student development - $415,000

Madrasah Education in Singapore

The madrasah in Singapore have been instrumental in developing Islamic scholars who are currendy holding key appointments in the religious sector namely the Registry of Muslim Marriages, Syariah Court, mosques and madrasahs in Singapore as well as the region.

To facilitate the madrasah to continue developing such icons and resource people is die Madrasah Strategic Unit (Madrasah SU), Muis.

What is Madrasah SU's strategic priority?

To develop Islamic scholars of national standing and Asatizah of quality for Singaporean Muslims.

What are the functional areas of Madrasah SU?

Madrasah SU looks into some of these core areas: -

1. Madrasah Curriculum

This is an active effort to bring madrasah education to move with the changing times. The curriculum involves development of these materials:-

a) Syllabus
b) Student Textbooks and Activity Books
c) Teachers' Manual
d) Resource Kit

Please click for information on the Philososohpy of Madrasah Education.

Please click for information on the Curriculum Development Project (CDP).

2. Teachers' Upgrading and Development

Madrasah SU provides opportunities for academic and professional development of asatizah, as well as enrichment programmes. This is achieved via the comprehensive Teachers' Training Road Map.

3. Overseas Students' Welfare & Development

A secretariat under Madrasah SU looks into the development and welfare of those who study Islamic Studies at institutes of higher learning overseas. This secretariat is called the Student Resource Development Secretariat (SRDS).

2. Assets Management Cluster (Pengelolaan Kepemilikan)

The Singapore Halal Certification Mark Trusted, Reliable, Widely Accepted

The Islamic Religious Council of Singapore (Muis) is your one-stop centre to Halal certification. As the sole custodian of Halal certification in Singapore, Muis ensures good Halal assurance standards in all certified premises. The Halal Certification Strategic Unit of Muis is ISO certified and provides a wide range of personalized.

MUIS & HALAL CERTIFICATION	FOR HALAL CONSUMERS	FOR MUIS HALAL CERTIFICATE HOLDERS
• Overview • Services • Contact Us •Frequentiv Asked Questions • Coming Soon!	• Basic Principles • Guidelines to Islamic Slaughtering • Guidelines to Preparation & Handling of Halal Food • Guide to Halal Food Selection • Food Additives Listing • List of Halal-Certified Eating Establishments	• Halal Certification Benefits •Tvpes of Halal Certification Schemes • Halal Certification Process • How to Apply • Halal Terms & Conditions • Halal Circulars

OVERVIEW

Majils Ugama Islam Singapura (Muis), also known as the Islamic Religious Council of Singapore, is the highest Islamic authority in-charge of Muslim affairs in Singapore. Muis was established as a statutory board in 1968, when the Administration of Muslim Law Act (AMLA) came into effect. Muis is to advise the President of Singapore on all matters relating to Islam in Singapore. Among other things, Muis provides Halal Certification services.

Muis is vested with the powers to act as the sole authority to administer and regulate Halal certification in Singapore. This is clearly stipulated in AMLA:

1) Section 88A(1): The Majlis may issue Halal certificates in relation to any product, service or activity and regulate the holders of such certificates to ensure that the requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, marketing or display of that product, the provision of that service or the carrying out of that activity

2) Section 88A(5): Any person who, without the approval of the Majlis a) issues a Halal certificate in relation to any product, service or activity; or b) uses any specified Halal certification mark or any colourable imitation thereof, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or both

The Muis' Halal services formally started in 1978. The move to set up its Halal Certification Unit was driven by the increasing demand for Halal-certified products and eating establishments, as well as the need to regulate the Halal industry.

Since then, Muis has certified more than 1,500 Halal certified premises and has played an important role as the custodian of Halal

food assurance for Singapore's 15% Muslim population. Furthermore, the promising Halal food industry with the availability of many Halal-certified eating establishments has helped to foster social interaction between individuals from diverse racial, cultural and religious backgrounds.

SERVICES

Muis is in-charge of issuing Halal certificates in relation to any food product, service or activity. It also ensures that the requirements of the Muslim law are complied with in the transportation, production, processing, storage, marketing and display of the food product, the provision of that service and the carrying out of that activity. Up till now, Muis has issued seven types of Halal certification schemes to cater to various sectors of the food and food-related industry.

Other Halal-related services conducted by Muis include Halal awareness courses, public education programmes, Halal complaints management and certification of social functions / events.

BASIC PRINCIPLES

According to the Islamic worldview, all food and drinks can be classified under one of the following categories:

1) Hâlal

'Halal' is an Arabic word which means lawful or allowable. Any food or drink which falls under this category is permitted for consumption. Most food and drinks are considered Halal unless they are stated clearly in the Holy Quran and Hadith as forbidden or non-Halal.

2) *Non-Halal*

'Non-Halal', also traditionally known as 'Haram', means unlawful or unallowable. As the name implies, any food or drink which is classified as non-Halal is prohibited for consumption. In general, all harmful things are non-Halal. Examples of these include the meat of dead animals and birds, flesh of swine, intoxicating drugs and alcoholic beverages.

3) *Syubhah*

Any food or drink which lies within the grey area and does not fall clearly under the Halal or non-Halal category is classified as 'Syubhah*, alternatively called questionable or dubious.

One example of a Syubhah ingredient is lecithin. Lecithin can be derived from plants or animals. It is considered Halal if the lecithin comes from plants but non-Halal should it come from pigs or animals that are not slaughtered in accordance with the Islamic law.

Until the status becomes clear, Muslims should avoid consuming Syubhah food or drinks. The Prophet (pbuh) has given a guideline concerning Syubhah matters. It is reported by Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah and Darimi, as follow:

Which means: What is Halal is clear. And what is Haram is also clear. And in between those two is a dubious area in which many people do not know about. So whoever distanced himself from it, he has acquitted himself (from blame). And

those who fall into it, he has fallen into a state of Haram. (Stiufí M'OIS atau (Pembinaan Umat Islam)

GUIDELINES TO ISLAMIC SLAUGHTERING

To ensure that the slaughtering of poultry is carried out in accordance with the Syari'ah, Muis has set down four stages of Halal control system for its Halal-certified poultry abattoirs :-

1st Stage: Sorting and Assessing of Poultry

In the first stage, the Muslim employees assigned have to check before slaughtering takes place that the poultry are still alive, healthy and free from any diseases and defects. Dead poultry must be properly segregated and disposed off. No unnecessary force to be used when hanging the poultry onto the shackle line.

2st Stage: Slaughtering of Poultry

Prior to the Halal slaughtering process, the Manager/Supervisor and the slaughterer shall conduct preslaughtering test to ensure that the poultry is not dead due to electrical stunning. This is performed by adjusting the correct electrical voltage to suit the poultry of varying sizes. Three or four birds will be tested by going through the stunner. Meanwhile, the water level in the blood drainage compartment must be kept to the minimal to ensure that the poultry's head is not fully immersed in the water.

In this second stage of the control system, the qualified Muslim slaughterers must stricdy comply with the Halal slaughtering requirements where the poultry is killed by cutting the windpipe, the gullet and the jugular vein with a sharp object (e.g. knife) to inflict a precise cut. In order to ensure optimal concentration and prevent fatigue during slaughtering, the speed of the moving shackle, on

which the poultry is hung, shall not be too fast. In addition to that, the slaughterers shall rotate duties with other qualified slaughterers every half an hour.

3d Stage: Halal Monitoring System

Before the poultry passes through the defeathering section, the Halal control system required the Muslim employees to verify and ensure that the animars windpipe, gullet and jugular vein are completely cut and rendered dead before it reaches the boiler.

4st Stage: Labeling of Poultry

The final control system involves labeling the slaughtered poultry. The Halal labels shall be tagged by Muslim employees only. The Muslim staff shall ensure that only poultry which has been slaughtered in accordance with the Islamic requirements shall be tagged with the Halal labels.

GUIDELINES TO PREPARATION & HANDLING OF HALAL FOOD

1. Sources Of Halal Food

1.1 Animals

Animals can be divided into two categories namely:

i) Land Animals
ii) Aquatic Animals

1.1.1 Land Animals

All land animals are lawful as food, except the following:

a. animals that are not slaughtered according to Shariah law;
b. pigs;
c. dogs;
d. animals with long pointed teeth (canines or tusks), which are used to kill prey, such as tigers, bears, elephants, cats and monkeys;
e. birds with talons or predator birds;
f. animals that are enjoined by Islam to be killed including mice, scorpions, snakes, crows, centipedes, etc;
g. animals that are forbidden to be killed including ants, bees and woodpeckers;
h. creatures that are considered filthy by the public such as lice and flies; and i. animals that live both on land and in water (amphibians) such as frogs and salamanders.

1. 1.2 Aquatic Animals

Aquatic animals are those, which live in water and cannot survive outside it, such as fish. All aquatic animals are “Halal” except those that are poisonous, intoxicating or hazardous to health.

1.2 Plants

All types of plants products are Halal” except those that are poisonous, intoxicating or are hazardous to health.

1.3 Drinks

All kinds of water and beverages are “Halal” as drinks, except those that are poisonous, intoxicating or are hazardous to health and that are mixed with “najis” e.g. alcoholic beverages, flavouring wines, etc.

2. Product Storage, Display And Servings

All "Halal" products that are stored, displayed, sold or served should be categorised and should be labeled as "Halal" or lawful at every stage of the process so as to prevent it from being mixed or contaminated with things that are impure or non-halal.

3. Product Processing And Handling

A processed food is "Halal" if it meets the following conditions:

1) the product or its ingredients does not contain any components or products of animals that are nonHalal by Shariah Law or animals that are not slaughtered according to Shariah Law;
2) the product does not contain anything in large or small quantities that is considered as najis according to Shariah Law;
3) the product is prepared, processed or manufactured using equipment and facilities that are free from contamination with najis; and
4) during its preparation, processing, storage or transportation, it should be fully separated from any other food that does not meet the requirements specified in items (a), (b) or/and (c) or any other things that are considered as najis by Shariah Law.

4. Hygiene And Sanitation

a) Hygiene has been given much emphasis in Islam and it includes the various aspects of personal hygiene, clothing, equipment and the working premises for processing or manufacture of food. The objective is to ascertain that the food produced is hygienic and is not hazardous to health.
b) Hygienic can be denned as free from no/is, contamination and harmful germs.

c) All foods shall be prepared, processed, packaged, transported and stored in such a manner that they are in compliance to hygiene and sanitary requirements of the relevant authorities.

GUIDE TO HALAL FOOD SELECTION

HALAL CERTIFICATION BENEFITS

1) Opportunities to tap a global Halal food market of about 1.4 billion people
2) Halal logo is an authoritative, independent and reliable testimony to support Halal food claims
3) 100% profit of greater market share: No loss of non-Muslim markets/clients
4) Enhance marketability of products in Muslim countries/markets
5) Small cost investment relative to multiple growth in revenues
6) Image boosts in meeting varied customer needs

TYPES OF HALAL CERTIFICATION SCHEMES

Presently, Muis offers seven types of Halal certification schemes to suit the various categories of the food and food-related industry. They are:

Product Scheme
Issued to locally-manufactured products

Eating Establishment Scheme (General)
Issued to restaurants, hawkers, school canteens, snack bars and Halal corners

Eating Establishment Scheme (Short-Term)
Issued to Halal certificate holders operating temporary stalls in bazaars, flea market, trade fairs, etc. This scheme is valid for a period of not more than 7 consecutive days.

Food Preparation Area Scheme
Issued to central kitchens which operate in hospitals and airport, and food caterers

Poultry Abattoir Scheme
Issued to poultry abattoirs for their freshly-slaughtered poultry

Endorsement Scheme
Issued to manufacturers, importers and/or exporters who intend to import and/or export their products

Storage Facility Scheme
Issued to stationary and/or mobile storage facilities for frozen, chilled and/or dry products

In addition to the above, Muis also provides Halal Food Certification for social functions such as luncheons, weddings, seminars, corporate gatherings, etc. organised in hotels, exhibition halls or outdoor locations.

3. *Corporate Services Cluster* (Kerjasama dalam Pelayanan)

The Islamic Religious Council of Singapore (MUIS) will organise

“RELIGION IN INDUSTRIAL SOCIETY” CONFERENCE

16 August 2006

(By Invitation Only)

The Islamic Religious Council (Muis) will be organising a conference on the theme “**Religion in Industrial Society”.**

The conference aims to fulfill the following objectives :

1) Search for a new equilibrium in positing religion’s appropriate role in emerging advanced industrial societies.
2) Compare the Western experience against that of the post-colonial developing world — from the perspective of institutional stabilization.
3) Identify social policy implications of an “accommodation” strategy between religious communities’ aspirations and the continuing social transformations generated by advanced industrial civilization.
4) The scope of the conference will cover the following key issues :

1, Religious Resurgence & Advanced Industrial Society

a. Assertive response of religious fundamentalism towards significant changes in more matured and advanced phases of industrial societies like :

b. The aggravation of moral dilemmas arising from the accelerating pace of scientific and technical changes in the extent of control over the human and physical environments.
   i. Social transformations and changing family structures - the entry of large numbers of women into the labour force, the increasing frequency of divorce, single - parenthood and remarriage, the drop in the average size of households, etc.
   ii. the intensification of gender- and sexual-preference-based advocacy

c. Increasing claims for the recognition and implementation of religious ideas, identities, values, practices, and institutions in the governance of nation-states and the lives of their citizens

d. New challenges posed by religious resurgence for both emergent and established nation-states.

2. Role of Religion in the Public Sphere

a. Growing importance of religion on the international scene - scholarly work, popular interest, diplomacy and peacebuilding.

b. The critical role of religious activism and its growing intervention in contested social policy debates e.g. Casino issue, sex education, homosexuality, condom usage, etc.

c. Appropriate role of religion and the concomitant recognition of this role in the public sphere.

3. Management of Religious and Cultural Difference

a) Emergence of careful management of religious and cultural differences and through respect for religious minorities in increasingly multi-religious and multicultural national contexts, as key elements for successful governance.
b) Need to get beyond the notion that religion and secularism are competing ideologies, and address the growing antagonism and misunderstandings between secularism, with its focus on individual rights, and the resurgence of religion, with its communitarian emphasis.
c) Need for remodelling of secularism to be more inclusive of the complex range of viewpoints now active in public life, including those predicated on religious belief or imperatives. Institutionalising inter-religious dialogue as a platform to address the challenges and opportunities of religious diversity and pluralism, particularly as safeguards from risks of religious conflict, or threats to peace posed by extremist religious groups.

Demikian sekelumit tentang contoh-contoh program MUIS.

5
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1) Bahwa politik atau peta politik di Singapura adalah sistem politik otoritarian, karena pemerintah Singapura berdasarkan pada sistem wesminster, presiden sebagai simbolik saja dan kekuasaan pemerintahan berada di tangán perdana mentri. Arena politik dikuasai oleh satu partai yaitu Partai Aksi Rakyat (PAP) yang cenderung autoritorían, dimana sistím tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara maju bebas dari kerusuhan dikarenakan membatasi pengaruh oposisi sehingga dapat dikatakan menganut paham demokrasi sosialis.
2) Bahwa kedudukan MUIS adalah sebagai kepanjangan tangán dari pemerintah Singapura dengan komunitas Muslim Singapura yang memisahkan antara urusan-urusan negara dengan urusan-urusan agama, disamping itu sebagai kebijakan dari pemnerintah Singapura dalam mengakomodasi komunitas Muslim Singapura untuk dapat menjalankan kehidupan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan al-qur'an dan sunah menuju masyarakat Singapura yang cemerlang.
3) Kebijakan politik dari Singapura bagi komunitas Muslim Singapura adalah memberikan ruang seluasluasnya untuk pembinaan perkembangan dan kemajuan kehidupan komunitas Muslim di dalam memahami dan memperaktikan kehidupan umat Islam, sehingga terjadi hubungan yang

harmonis dan sinergis antara pemerintang dengan komunitas Muslim Singapura melalui lembaga-lembaga MUIS, LPQS, Mahkama Syari'ah dan MABIMS.

4) Bentuk partisipasi dari komunitas Muslim Singapura dalam kedudukannya sebagai warga negara dengan menjalankan kehidupan dengan baik, memahami dan memperaktikan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kultur budaya Asia (political environment) sehingga dapat menjadi komunitas yang survive dan eksis meskipun hidup dilingkungan mayoritas etnis Cina.

B. Saran-Saran

Dari uraian tersebut diatas dapat ditemukan sesuatu hal-hal yang perlu disempurnakan yang tercrmin dalam saran-saran:

1) Bagi para pemikir politik Islam untuk tidak terpaku pada satu madzhab dalam melakukan rekonstruksi tentang Islam dan demokratisasi dalam bentuk gerakan yang radikal yang dapat merugikan umat Islam dengan terbentuknya opini image yang négatif terhadap Islam, bahwa Islam identik dengan kekerasan.
2) Bagi para komunitas Muslim yang minoritas untuk dapat menggali nilai-nilai ajaran Islam baik dari interpretasi ayat-ayat yang termaktub dalam al-qur'an maupun dari nilai-nilai budaya dan kultur masyarakat setempat dengan menj alani kehidupan yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah yang ada, sehingga menjadi suatu komunitas yang dapat survive dan eksis dalam menjalankan kehidupan disegala aspek baik ekonomi, politik maupun kehidupan sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, Jakarta Paramadina, 1996.

Ahmad Ali nurdin, Politik Islam Tidak Monolitik, Wikipedia, Berbahasa Indonesia.

Arthur Goldschmidt, Jr, A Concdse History of...

Bahtiar Effendi, Disartikulasi Pemikiran Politik Islam, III T (The International Institute of Islamic Tought Indonesia), Wikipedia, Berbahasa Indonesia.

Blontypix, Singapura Potrei Pemerintahan Paranoid, September 2006

Edi Masjudi, Realisasi Nilai-Nilai Asia di Singapura, Wacana, Republika 12 Agustus 2004

Gullain Denoeux, The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam, Middle East Policy, Vol 9, June

2002 Greg Poulgrain, The Genesis of Malaysia Konfrontasi:Brunei and Indonesia, 1945-1965.

Herri Nurdi, Menguak Cinta Kahasia Israel-Singapura, Kamis, 23 November 2006.

James P.Piscatari, Islam in a World...

Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 2006.

Maurice Doverger, Sosiologi politik, Jakarta, Rajawali Pers, 2003

Panduan Penulisan skripsi dan Tesis IAIN “SMH”Banten

Republika, Israel Di Asia Tenggara Bagian 2, Jumat, 10 Januari 2003.

Sayyid Qutub, Islamic The Religion of Future, Delhi, Ishaat al Islam Transt, 1350.

Suzanne haneef, Ehat Everyone Should Know about Islam and Muslim, Cicago, 1982.

Suara Merdeka, Wacana, Kamis, 12 Agustus 2004.

The Encyclopedia Brita Nie, hai, 769-788

Wikipedia, Simbol-Simbol Kebangsaan Singapura, 24 November 2006.

Wikipedia Indonesia, Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia.

BIODATA PENULIS

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si. lahir di Serang pada tanggal 12 Februari 1964, anak ke 3 dari 8 bersaudara pasangan Prof. DR. H.M. Junus Gozali dan Hj. Mamduchah Arifudin.

la menempuh pendidikan formalnya pada SDN 2 Cilegon (tamat 1975-1976), melanjutkan ke tingkat SLTP Negeri 1 Cilegon (tamat 1978-1979), lalu meneruskan ke SLTA Negeri 1 Serang (tamat 1983-1984), kemudian melanjutkan ke Fak. Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung jurusan Perdata Pidana Islam hingga meraih Sarjana lengkap (tamat 1989-1990), kemudian meraih gelar Magister dari Universitas Islam Indonesia di bidang Ekonomi Islam (tamat 2005-2006), dan saat ini sedang menempuh pendidikan program Doktor (S3) pada sekolah Pasca Sarjana UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta, dengan konsentrasi Ekonomi Islam.

Karirnya dimulai sebagai Asisten Dosen dan Staf Subag Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung (1990-1993), kemudian sebagai dosen dan ketua Program Studi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin STAIN "SMHB" Serang (2000-2003), dosen pada Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin (1992-sekarang), Ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN "SMH" Banten (2003-2006), Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN "SMH" Banten (2007-sekarang).

Istri dari seorang dokter dan ibu dari 2 puteri ini selain tugas utamanya sebagai dosen juga aktif dalam kepengurusan berbagai organisasi antara lain; pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Propinsi Banten, pengurus PUSKUM-HAM, pengurus Pusat Studi Wanita (PSW) dan ketua Jurnal al-Fath.

Karya tulis yang pernah dibuat antaralain; “Peran Wanita dalam bidang Politik (Studi Kwota 30% wanita di Législatif, “Sistim Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Alternatif (Jurnal al-Qolam), “Kontribusi Organisas” Wanita Muslimat, Aisiyah dan Persisten dalam Pembinaan Umat” (Penelitian), “Wanita dan Peran Politik dalam Perspektif Islam” (Penelitian), “Islam di Singapura (Studi Peran MUIS dalam Pembinaan IJmat Islam Singapura:” (Penelitian).

Pembahasan mengenai Islam dan politik di Singapura dikaitkan dengan peranan lembaga MUIS dalam peranannya sebagai mediator bagi komunitas muslim melayu cukup signifikan dengan alasan-alasan :

1. Singapura sebagai negara transit perdagangan dunia internasional diapit oleh dua negara yang penduduknya mayoritas muslim melayu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan di kawasan Asia Tenggara.

2. Sebagai negara republik yang menggunakan sistem parlementer, ternyata sistem politik Singapura sangat terpengaruh oleh nilai-nilai lokal (Asia Value), bagaimana wujud praktek nilai-nilai Asia tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diterapkan.

3. Sebagian besar mayoritas bangsa Singapura adalah etnis tionghoa, sehingga kebijakan politik pemerintahannya adalah otoriter, bagaimana kebijakan itu implementasi-nya terhadap muslim melayu.

Jl. Yudistira 17, Kesling Citra Pelamunan Indah,
Serang, Banten 42616. Email: mediakaryapublishing@gmail.com